



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **PELAKSANAAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 1970 TAHUN 2011 TENTANG LIBYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN DAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL**

## **SKRIPSI**



**NICKI YANTES**  
**05 940 005**

**JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**No. Reg: 52 / PK VII / I / 2012**

**PELAKSANAAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO.1970  
TAHUN 2011 TENTANG LIBYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
KEAMANAN DAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL**

**Oleh :**

**Nicki Yantes**  
**BP. 05 940 005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang Komprehensif dan dinyatakan lulus  
Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 oleh Tim Penguji yang terdiri dari :**

**DEKAN**

**Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.**  
**NIP : 1962 0718 1988 1010 01**

**PEMBANTU DEKAN I**

**Yoserwan, SH., MH., LLM**  
**NIP : 1962 1231 1989 0110 02**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Mardenis, SH., MSi**  
**NIP : 1961 1112 1989 0310 03**

**PEMBIMBING II**

**Defivanti, SH., MH**  
**NIP : 1975 0216 2001 1220 01**

**PENGUJI I**

**Narsief, SH., M.H**  
**NIP : 1951 0707 1980 0310 03**

**PENGUJI II**

**H. Najmi, SH., MH**  
**NIP : 1959 0408 1986 0310 03**



*"Bismillahirrahmanirrahim"*

*Tidak ada kesempatan akal yang melebihi perencanaan yang baik  
Dan matang, dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari  
Akhlak yang mulia (Akhlakul Karimah)*

*"Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa  
Yang dikehendaki-Nya. Barang siapa mendapat hikmah itu,  
sesungguhnya ia telah mendapatkan kebajikan yang banyak,  
dan tiadalah yang menerima peringatan, melainkan  
Orang-orang yang berakal"  
(QS Albagarah 269)*

*Terima kasih oh Tuhan...  
Engkau telah berikan aku kesempatan  
Untuk menggali karunia-Mu yang amat dalam  
Jauhkan aku dari resah dan putus asa  
Dan terangi langkahku dalam perjuangan  
Yang belum selesai  
Walau langkah tertatih-tatih penuh cucuran keringat dan air mata  
Yang penuh dengan segala rintangan  
Namun, berkat kesabaranku, walau jiwa dan hatiku merintih  
Karena aku yakin.....  
Allah Maha Pemurah dan Maha Bijaksana  
Cita-cita tanpa pengorbanan ibarat pohon tidak berbuah  
Ilmu tanpa pengalaman ibarat hidup tanpa tujuan*

**K***upersembahkan setetes keberhasilan ini untuk*

*Mereka yang sangat berarti dan telah membuatku lebih  
Memahami hidup dan mencintai kehidupan sehingga membawaku dalam meraih semua ini  
Hormat dan sujudku untuk orang tuaku tercinta.....,  
Papa "Tesi Akmal" dan Mama "Yuli Yenti"  
Kumohon do'a restumu selalu dalam mengarungi hidup ini,  
Serta adik-adikku Wimbi Yantes dan Angga Yantes yang tersayang.*

*Terimalah ini sebagai tanda cinta, bakti dan terima kasihku  
Atas kasih sayang, dorongan dan semangat serta materi,  
Hingga jasamu tidak terlupakan selama-lamanya.*



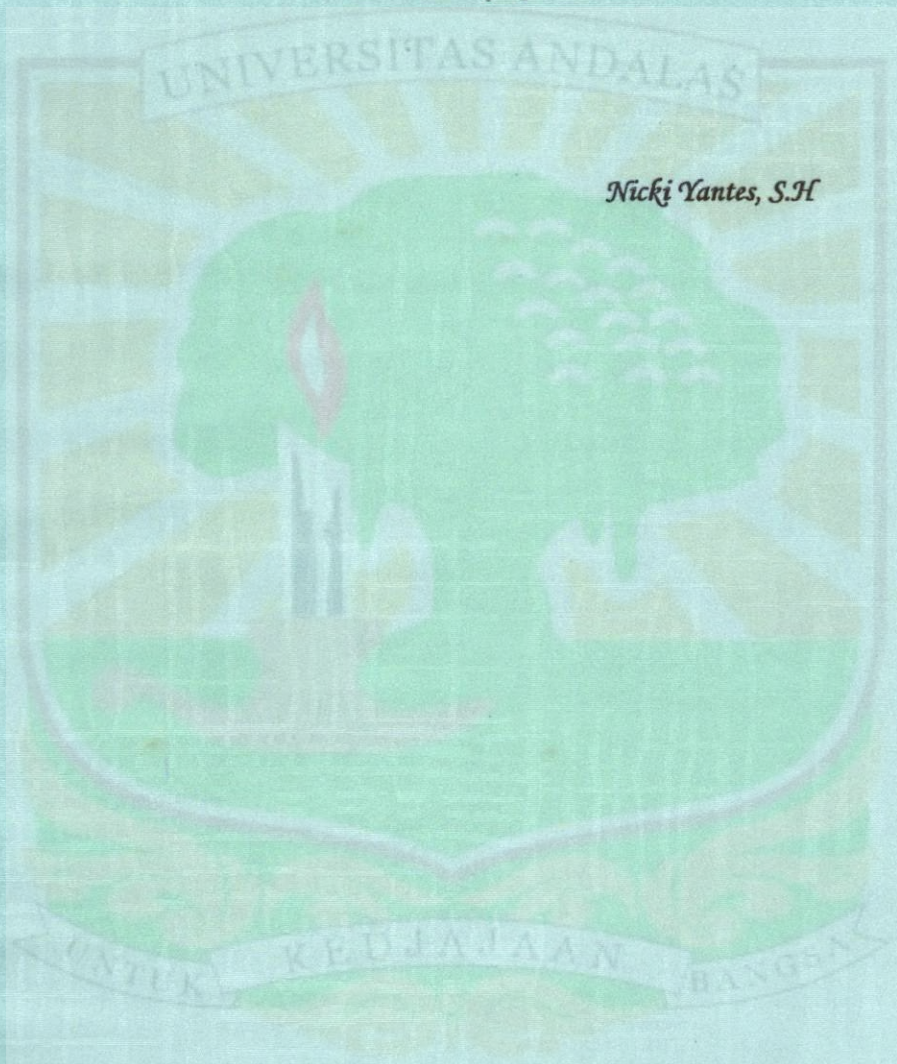
*Untukmu yang pernah aku cintai.....*

*Keberhasilanku menyelesaikan studi ini tak terlepas dari "butir-butir pasir"*

*Yang pernah kau taburi di ruang hatiku yang terdalem*

*Aku yang pernah dulu pernah engkau cintai.....,*

*'tunai sudah janji bakji....*



*Nicki Yantes, S.H*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah, SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik yaitu skripsi yang diberi judul : **“PELAKSANAAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 1970 TAHUN 2011 TENTANG LIBYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN DAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL”**

Didorong oleh semangat dan keyakinan serta berserah diri kepada Allah , SWT penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya guna memenuhi salah satu tugas dan kewajiban melengkapi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Dengan segala keterbatasan serta ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tentulah dalam penulisan skripsi ini menyadari akan kekurangan dan kelemahan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang akan menyempurnakan skripsi ini.

Skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan dan dorongan semangat dari pihak-pihak yang selama ini telah banyak membantu penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang telah banyak membantu baik secara materi maupun dorongan serta do'a kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai. Dan juga penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :



1. Bapak Prof. Dr. H. Yuliandri, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH. MH selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara, SH. MS selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurnia warman, SH. M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Afriwal Gusti, SH selaku Ketua Program Reguler Mandiri.
6. Ibu Afriani, SH. MH selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri.
7. Bapak Dr. Ferdi, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Ibu Delfiyanti, SH. MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Univesitas Andalas.
9. Bapak Dr. Mardenis, SH.,MH., selaku Pembimbing I dan Ibu Delfiyanti, SH. MH selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas.
11. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
12. Abang-abang dan Kakak-kakak Alumni Fakultas Hukum Reguler Mandir Unversitas Andalas semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dorongannya dan Masukannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.



13. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan – 05 yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bantuannya.
14. Adek-adek atau junior-junior dibawah Angkatan – 05 Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
15. Teman-teman atas dukungannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2011

Penulis







No. Alumni Universitas

Nicki Yantes

No. Alumni Fakultas

a). Tempat/Tanggal Lahir : Duri/04 Desember 1985 b). Nama Orang Tua : Tesi Akmal c). Fakultas : Hukum Reguler Mandiri d). Jurusan : Hukum Internasional e). BP : 05.940.005 f). Tanggal Lulus : 31 Januari 2012 g). Prediket Lulus : B+ h). IPK : 2,94 i). Lama Studi : 6 Tahun 5 Bulan j). Alamat : Jl. Komplek Talang No.182 Duri-Riau.

## PELAKSANAAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1970 TAHUN 2011 TENTANG LIBYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN DAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL

Skripsi oleh : Nicki Yantes, Pembimbing : 1). Dr.Mardenis, SH. MSi., 2). Delfiyanti, SH. MH.,

### ABSTRAK

Political upheaval in the country Libya in early 2011, has killed more than a thousand demonstrators. Moamar Qadafi as the president of Libya has violated human rights by massacring the demonstrators. It has come under fire from the international world and it is feared would disrupt the peace and international security. To that end, the UN Security Council began to take systematic steps to resolve the conflict in Libya through Resolution No. 1970 Year 2011 About Libya. Inside this writing, there are two formulation of the problem, namely: 1) How does the legal aspects of the UN Security Council Resolution No. 1970 of 2011 against Libya? 2) How is the implementation of Security Council Resolution No. 1970 in 2011 by the international community? 3) What's the problem for implications for international peace and security?.The research approach used in this paper is Normative Legal research, is research conducted on primary legal materials, tertiary and secondary. From the results of discussions conducted on library materials and legal materials.Based on research conducted, the following conclusion can be given: 1) Resolution issued by the Council of the United Nations Security 1970 numbers in 2011 is the appeal that Moamar Qadafi stop human rights abuses against the people of Libya, the Security Council referral for human rights violations committed Moamar Qadafi brought to the Court of Criminal international arms embargo, travel ban and asset freeze against Moamar Qadafi and his cronies. 2) Implementation of UN Security Council Resolution 1970 of 2011 against Moammar Qhadafi has been used as guidelines by the UN Security Council to use the armed forces of Libya when Libya's president Moammar Qhadafi which does not comply with or has violated the rules of the UN Security Council resolution number 1970 of 2011 . 3) Security Council Resolution No. 1970 of 2011 has provided significant implications in the realization of international peace and security, especially in policy to stop Moammar Qhadafi deeds that perform a variety of international violations. The direct impact that affects the security and peace internationally are other countries decide good working relationship technically to diplomatic, economic, and termination of transport by land, sea and air.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Januari 2012

Abstrak telah disetujui penguji :

Penguji

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Narsief, SH.MH	H. Najni, SH.MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Internasional : Dr.H. FERDI, SH.MH.,

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas/Universitas		
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda tangan :



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Dewan Keamanan PBB	
1. Sejarah Lahirnya Dewan Keamanan PBB.....	12
2. Keanggotan Dewan Keamanan PBB.....	15
3. Sistem Pemungutan Suara Dewan Keamanan PBB.....	16
4. Fungsi Dewan Keamanan PBB.....	27
B. TINJAUAN UMUM TENTANG LIBYA	
1. Sejarah Negara Libya.....	43
2. Sistem Pemerintahan Libya.....	46
3. Bentuk Kerjasama Libya Dengan Negara Lain.....	49
<b>BAB III    HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Aspek Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970	
Tahun 2011 Terhadap Libya.....	51



B. Pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011.....	67
C. Implikasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011 Terhadap Keamanan dan Perdamaian Internasional.....	69

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum internasional merupakan suatu kaedah hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara, Negara dengan Negara, Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara<sup>1</sup>. Yang dimaksud dengan subjek hukum bukan Negara disini adalah organisasi Internasional, seperti organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disingkat dengan PBB atau yang dikenal secara Internasional dengan nama *United Nations* (UN). Organisasi internasional bersifat universal yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia yang telah lama menjadi pemikiran banyak negarawan.<sup>2</sup> Pembentukan organisasi internasional yang diinginkan masyarakat internasional secara politik disebabkan oleh sengketa-sengketa antar Negara. Organisasi internasional menghimpun Negara di dunia dalam suatu sistem kerja sama yang dilengkapi dengan organ-organ untuk dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antara mereka agar batas-batas nasional dapat dilewati. Oleh karena itu diperlukanlah suatu organisasi politik sentral yang dilengkapi dengan sarana-sarana paksaan atau persuasif terhadap

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "*Pengantar Hukum Indonesia*" Penerbit PT Alumni, Bandung, 2003, hal, 4

<sup>2</sup> *ibid*, hal, 10



Negara serta wewenang untuk mengkoordinir lembaga-lembaga teknik dan regional.<sup>3</sup>

Diantara organisasi-organisasi Internasional dan regional yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa Internasional, jelaslah bahwa PBB mempunyai tempat khusus karena kegiatan-kegiatannya mencakup hampir semua bidang dengan peranan utamanya yang diberikan masyarakat internasional yaitu, menjaga keamanan dan perdamaian dunia, agar keamanan dan perdamaian dapat terjamin demi keselamatan umat manusia. Tentunya sengketa-sengketa yang terjadi harus diselesaikan secara damai dan peranan PBB sangat penting dalam hal ini. Penyelesaian secara damai yang dimaksud adalah seperti yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (3) Piagam PBB, yang menyatakan bahwa *“anggota-anggota PBB harus menyelesaikan sengketa-sengketa Internasional mereka secara damai sebegitu rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional tidak terancam”*.

PBB terdiri dari beberapa organ utama dalam melaksanakan tugas dan peranannya. Salah satunya yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia adalah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB ini terdiri dari 5 (lima) Negara anggota tetap, yaitu RRC, Inggris, Rusia, Perancis dan Amerika Serikat, serta 15 (lima belas) Negara anggota tidak tetap yang diganti setiap 2 (tahun) sekali.<sup>4</sup> Peranan utama Dewan Keamanan PBB dikukuhkan dalam Pasal 24 Ayat (1) Piagam PBB

---

<sup>3</sup> Boer Mauna, *“Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)”*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2003, hal, 415

<sup>4</sup> J.G. Starke, *“Pengantar Hukum Internasional (Edisi Kesepuluh)”* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal, 842



yang menyatakan “agar PBB dapat mengambil tindakan segera dan efektif, Negara-negara anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan PBB untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional dan setuju bahwa dewan keamanan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama Negara-negara anggota”.<sup>5</sup> Selanjutnya wewenang dari Dewan Keamanan PBB diatur lebih rinci lagi, yaitu:

1. Penyelesaian damai atas sengketa-sengketa Internasional;
2. Tindakan preventif dan memaksa untuk memelihara perdamaian dan keamanan;
3. Badan-badan dan perjanjian-perjanjian regional;
4. Kontrol dan supervisi atas wilayah-wilayah perwalian yang digolongkan sebagai kawasan-kawasan strategis;
5. Penerimaan, penskoran dan pemecatan negara-negara anggota
6. Amademen terhadap Piagam PBB; dan
7. Bersama-sama dengan Majelis Umum PBB melakukan pemilihan ke lima belas hakim *International Courts of Justice*.

Dewan Keamanan PBB telah diberi tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Untuk itu, dapat mengambil keputusan-keputusan efektif untuk untuk menjamin tindakan yang layak oleh PBB. Menurut Pasal 25 Piagam PBB, negara-negara anggota setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan. Meskipun Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan,

---

<sup>5</sup> Boer Mauna, *ibid*, hal,210



tanggung jawab ini bukanlah yang eksklusif.<sup>6</sup> Majelis Umum memiliki wewenang untuk membahas dan memberikan rekomendasi berkenaan dengan masalah tersebut dan tindakan dapat diambil berdasarkan persetujuan-persetujuan regional atau oleh badan regional.

Untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional agar tetap terpelihara, sengketa-sengketa atau konflik yang timbul pada subjek hukum internasional harus diselesaikan secara damai. Dewan Keamanan PBB tidak hanya menyelesaikan sengketa-sengketa antar Negara, tetapi juga menyelesaikan sengketa internal dalam suatu Negara. Dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi, Dewan Keamanan PBB berwenang mengeluarkan suatu keputusan yang disebut resolusi. Resolusi ini adalah merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 5 negara anggota tetap dan 10 negara anggota tidak tetap yang dipilih oleh sidang umum PBB untuk masa bakti 2 tahun, dimulai setiap 1 Januari. Sudah beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi sengketa-sengketa yang muncul ke dunia internasional.

Misalnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011 Tentang Libya. Seperti yang diketahui, bahwa pada awal tahun 2011 terjadi konflik internal di dalam Negara Libya tersebut, dimana pemimpin Libya Muammar Ghadafi yang telah memimpin revolusi selama 41 tahun, mengabaikan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia secara

---

<sup>6</sup>J.G. Starke, *ibid*, hal, 845



menyedihkan selama bertahun-tahun. Akibatnya rakyat Libya melakukan demonstrasi secara besar-besaran. Oleh karena demonstrasi rakyatnya ini, Muammar Ghadafi melakukan pembunuhan terhadap demonstran. Pergolakan di Libya mengundang perhatian dunia Internasional, sebab dengan munculnya pergolakan tersebut telah membawa perubahan politik dan ekonomi terhadap Negara-negara yang menjalin kerjasama multilateral dengan Libya. Melihat keadaan ini, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1970 Tahun 2011 Tentang Libya untuk mengatasi konflik dan pergolakan tersebut.

Sesuai Pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB akan menentukan apakah memang ada ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian atau agresi. Selanjutnya Dewan Keamanan PBB akan membuat rekomendasi yang diperlukan bagi pemeliharaan ataupun pemulihan perdamaian dan keamanan. Dewan Keamanan PBB juga dapat melakukan investigasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas keadaan yang terjadi. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, Dewan akan menetapkan apakah peristiwa yang terjadi merupakan ancaman atau tidak terhadap perdamaian dan keamanan Internasional. Selain itu Dewan Keamanan PBB juga dapat memutuskan tindakan-tindakan sementara yang dianggap perlu untuk mencegah buruknya keadaan. Kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah kewenangan tersebut tidak disalahgunakan oleh negara anggota untuk tujuan politiknya. Untuk itu perlu dikaji secara yuridis tentang dasar-dasar pembuatan resolusi, apakah sesuai dengan ketentuan hukum Internasional atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul “**Pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011 Tentang Libya dan Implikasinya Terhadap Keamanan dan Perdamaian Internasional ”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah aspek hukum dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011 terhadap Libya?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1970 Tahun 2011 terhadap Libya?
3. Apasajakah implikasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011 Terhadap Keamanan dan Perdamaian Internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui aspek hukum dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011 berdasarkan Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011.
3. Untuk mengetahui implikasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011 terhadap keamanan dan perdamaian Internasional.



#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

- a. Diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan.
- b. Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan sebagai mahasiswa hukum dalam bidang Hukum Internasional.
- c. Sebagai upaya dalam menambah atau memberi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya mengenai materi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011 Tentang Libya.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak termasuk diri penulis, untuk mengetahui proses perkembangan konflik yang terjadi di Libya dan perkembangan tindakan Dewan Keamanan PBB terhadap Libya melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian ilmiah, karena dapat membantu mendekatkan antara masalah yang dihadapi dengan teori yang ada, kemudian mengaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi.

## 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, artinya penelitian yang dilakukan terhadap hukum kepustakaan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Perpustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelusuran terhadap bahan-bahan buku dengan tujuan memperoleh data sekunder, yakni data yang telah ada dan diperoleh dengan penelitian kepustakaan. Data sekunder ini meliputi:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain yaitu:

- a) Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011
- b) Piagam PBB

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

- a) Tulisan-tulisan ilmiah bidang hukum tentang Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011;
- b) Pendapat pakar-pakar Hukum Internasional dari hasil penelitian;
- c) Seminar-seminar; dan



- d) Jurnal-jurnal tentang Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011.

3) Bahan Hukum Tersier

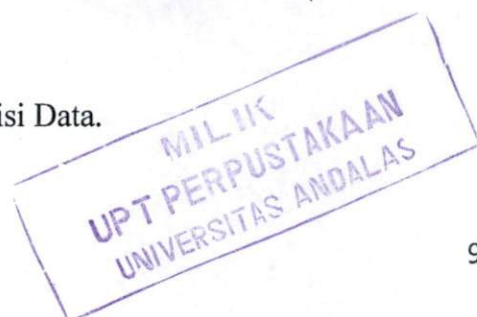
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan internet. Studi dokumenter/ studi kepustakaan merupakan sumber utama penelitian ini karena penelitian ini memusatkan pada data sekunder. Bahan- bahan kepustakaan yang berupa hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, diteliti dan ditelaah untuk disaripatikan dengan judul skripsi penulis yaitu **“Pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011 Tentang Libya dan Implikasinya Terhadap Keamanan dan Perdamaian Internasional”**

3. Metode Pengumpulan Data.

Data dalam penelitian kepustakaan diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas; dan
- d) Perpustakaan Umum Wilayah Pekanbaru Riau.

4. Teknik Pengolahan Data Dan Analisi Data.



Alat pengumpulan data yang diperoleh dari studi dokumen atau bahan hukum ini diharapkan dapat menjadi sumber data yang memadai, sehingga dapat dilolah, dianalisa dan dikonstruksi secara kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan secara kualitatif normatif. Penganalisaan data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan analisa deskriptif yaitu berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa tentang kebijakan Dewan Keamanan PBB dalam mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1970 Tahun 2011, serta keterkaitan Resolusi tersebut dengan kaidah- kaidah Hukum Internasional.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam menguraikan permasalahan dan pembahasan atas skripsi ini yang berjudul: **“PELAKSANAAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 1970 TAHUN 2011 TENTANG LIBYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN DAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL”** penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian yang menjelaskan alasan dalam pemilihan judul, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan



penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum kajian dalam penulisan ini.

## **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi pengertian – pengertian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dengan mengacu pada bahan - bahan pustaka yang ada, yang merupakan landasan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan dalam rangka mengarah kepada pembahasan masalah dalam penulisan ini.

## **BAB III    HASIL DAN PEMBAHASAN**

Membahas hasil penelitian dan pembahasan atau analisa data tentang Pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011 Tentang Libya dan Implikasinya Terhadap Keamanan dan Perdamaian Internasional

## **BAB IV    PENUTUP**

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran – saran terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Dewan Keamanan PBB

##### 1. Sejarah Lahirnya Dewan Keamanan PBB

Proposal-proposal Dumbarton Oaks menyatakan perlunya suatu organ eksekutif dengan anggota terbatas yang akan diperlukan untuk mengemban kewajiban utama memelihara perdamaian dan keamanan Internasional. Memang peningkatan tingkat sentralisasi prosedur untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang berbeda jika dibandingkan dengan liga, membuat Dewan Keamanan menjadi lebih penting daripada *council* pada Liga Bangsa-Bangsa. Yang diperlukan disini adalah sebuah organ eksekutif kecil, berfungsi secara kontinu dan dapat mengambil keputusan secara cepat dan efektif agar dapat melaksanakan perangkat pemaksaan (*enforcement machinery*) dari Bab II Piagam PBB manakala perdamaian dan keamanan Internasional terancam.<sup>7</sup>

Pasal 23, yang telah diubah menyatakan bahwa Dewan Keamanan terdiri dari 15 anggota, dimana lima anggota diantaranya merupakan anggota-anggota “tetap” yaitu RRC, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat. Lima anggota tetap ini menikmati status luar biasa (eksepsional) tidak hanya

---

<sup>7</sup>D.W. Bowet, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hal, 34



berdasarkan atas kepermanenannya saja, akan tetapi juga oleh alasan-alasan khusus antara lain, seperti kita akan lihat nanti, terutama kekuasaan “veto”. Alasan sah bagi pemberian status luar biasa untuk lima anggota tetap ini terletak dalam “*inescapable fact of powers differentials*” mengutip istilah JESSUP.<sup>8</sup> Dengan perkataan lain dasar pikiran yang melandasinya yaitu bahwa pada anggota-anggota tetap ini dibebankan tanggung jawab terberat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan karena itu kepada mereka harus diberikan hak suara final dan menentukan dalam memutuskan tentang bagaimana tanggungjawab itu harus dilaksanakan. Akhirnya, semua negara penandatangan Piagam PBB telah sepakat mengenai, sistem yang mungkin sebaliknya (yaitu jika misalnya jika tidak ada perjanjian demikian) justru bertentangan dengan prinsip “persamaan kedaulatan seluruh anggota PBB” yang menjadi landasan organisasi Pasal 2 Ayat (1) Piagam PBB.<sup>9</sup>

Asumsi yang dibuat tahun 1945 bahwa kelima negara tersebut merupakan “negara-negara terbesar” tentu merupakan suatu keputusan politis. Pencantuman mereka dalam Charter sesungguhnya menggambarkan suatu elemen statis pada Charter, karena tidak dapat selamanya diterima bahwa kelima anggota tetap ini dipandang sebagai “negara-negara terbesar/ *great powers*”, dan dalam suatu organisasi yang diharapkan kekal masalah-masalah akan timbul jika terjadi suatu pergeseran kekuatan yang ada. Masalah-masalah

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal, 34

<sup>9</sup> *Ibid*, hal, 34-35



itu akan bertambah parah dengan adanya prosedur bagi perubahan Piagam PBB yang menurut Pasal 107 dan 108 mensyaratkan adanya persetujuan kelima anggota tetap tersebut. Sulit untuk membayangkan suatu anggota akan memutuskan untuk melepaskan status itu.<sup>10</sup>

Kesepuluh anggota Dewan Keamanan lainnya, yaitu anggota-anggota tidak tetap dipilih untuk masa jabatan dua tahun melalui Majelis Umum, dan tidak dapat secepatnya dipilih kembali pada pemilihan periode berikutnya. Agar terjamin suatu kontinuitas tertentu, pemilihan itu dilakukan secara bergilir. Setiap tahun dipilih lima anggota dengan melalui 2/3 suara mayoritas memilih. Pasal 23 Piagam PBB sendiri menyebutkan kriteria tertentu yang dipakai dalam pemilihan-pemilihan ini, yaitu sumbangan terhadap “pemiliharaan dan keamanan Internasional dan kepada tujuan-tujuan lain dari organisasi” dan “distribusi geografis yang adil”. Dari sepuluh kursi yang tersedia, saat ini dibagi menurut formasi berikut: Afro Asia (5 kursi) Eropa Timur (10) Amerika latin (2), eropa Barat dan lainnya (2 kursi). Alokasi ini berdasarkan tas resolusi nomor 1991 (XVIII) A Majelis Umum dan bukan atas protokol perubahan. Bagaimana pun jelas bahwa formulasi sekarang ini menggantikan “gentlemen’s agreement” 1946 sebelumnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal 35

<sup>11</sup> Penangguhan hak-hak istimewa ini secara tegas harus dibedakan dari penolakan untuk menyetujui surat-surat kepercayaan para delegasi dari negara Anggota, seperti yang terjadi pada tahun 1958 dan 1959 pada waktu General Conference ILO menolak surat-surat kepercayaan delegasi pemerintah, buru dan pengusaha dari hungaria; lihat lebih jauh dalam bagian akhir Bab ini. Dikutip dari D.W. Bowett, “*Hukum Organisasi Internasional*”, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal 35- 36



Selain dari masalah negara mana yang akan duduk di Dewan Keamanan, masih terdapat masalah lain yaitu mengenai pemerintah yang dianggap berhak mewakili suatu negara. Masalah ini timbul apabila terdapat dua pemerintah yang bersaing, dimana keduanya mengklaim sebagai wakil negara tersebut, atau jika ada penolakan terhadap cara-cara yang dilakukan sebuah pemerintah saat memperoleh kekuasaan.<sup>12</sup>

## **2. Keanggotaan Dewan Keamanan PBB**

Dewan Keamanan dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan berfungsinya terus-menerus dan seorang wakil dari setiap anggotanya harus hadir sepanjang waktu di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tanggal 31 Januari 1992 untuk pertama berlangsung pertemuan puncak Dewan Keamanan di markas besar, yang dihadiri oleh 13 kepala negara dan pemerintahan dari 15 negara anggota Dewan Keamanan dan menteri-menteri luar negeri dari dua negara anggota yang kepala pemerintahannya tak bisa hadir. Kalau dianggap perlu, Dewan Keamanan bisa bersidang dimana saja selain di markas besar. Pada tahun 1972, Dewan Keamanan menyelenggarakan sidang di Addis Ababa, Ethiopia dan tahun berikutnya dia mengadakan pertemuan di kota Panama, Panama.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 36

<sup>13</sup> Kantor Penerangan PBB, *op.cit*, hal, 15

### 3. Sistem Pemungutan Suara Dewan Keamanan PBB

Piagam PBB memberikan ketentuan mengenai langkah-langkah apa yang harus diikuti oleh negara, baik sebagai anggota maupun bukan anggota PBB apabila terlibat di dalam suatu persengketaan. Negara-negara itu mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap persengketaan yang timbul diantara mereka secara damai. Dalam hal terjadi suatu persengketaan, sebelum memajukannya ke PBB, para pihak wajib "mencari penyelesaian melalui negosiasi, pertanyaan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian secara hukum dan mengambil jalan melalui badan atau dengan jalan damai lainnya menurut pilihan mereka".<sup>14</sup> Apabila Perselisihan itu sedemikian rupa tidak dapat didelesaikan, maka pihak yang bersengketa atau setiap anggota PBB ataupun sekjen PBB dapat membawa masalahnya ke Dewan Keamanan PBB dan majelis Umum PBB untuk menjadi perhatian badan-badan tersebut. Hal ini dapat dipahami karena pada mulanya dimaksud bahwa dalam hampir semua kasus, Dewan Keamanan PBB lah yang dianggap sebagai wasit, mengingat tanggung jawab utamanya dibidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional. Itulah sebabnya apabila suatu perselisihan dihadapkan kepada Dewan Keamanan, pilihan yang pertama dan yang paling sederhana disarankan oleh badan itu kepada para pihak yang bersengketa adalah agar mereka

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 33 piagam PBB, dikutip dari Sumaryo Suryokusumo. "Organisasi Internasional". Jakarta: Universitas Indonesia. 1987. Hal 9



menyelesaikannya dengan salah satu dari penyelesaian secara damai yang disebutkan diatas.<sup>15</sup>

Mengingat cara-cara penyelesaian persengketaan secara damai yang bersifat tradisional dan disusun dalam Pasal 33 Piagam PBB, merupakan upaya dasar bagi proses penyelesaian baik dalam kerangka maupun di luar kerangka PBB , maka jelaslah bahwa setiap upaya tetap dibenarkan. Beberapa ragam dan penyempurnaan cara-cara tradisional itu telah dikembangkan oleh PBB, tetapi cara-cara pokoknya sesuai dengan aturan dan praktek yang sudah lama berkembang.<sup>16</sup>

Partisipasi negara di dalam kegiatan organisasi Internasional adalah ikut sertanya negara itu sebagai anggota dalam perdebatan dan pembicaraan, tetapi tidak ikut memberikan suaranya dalam pemungutan suara. Suatu negara anggota PBB misalnya, dapat pula tidak diperkenankan untuk bersuara didalam persidangan Majelis Umum PBB karena telah menunggak pembayaran kontribusinya bagi badan tersebut selama dua tahun atau lebih.<sup>17</sup> Aturan mengenai hal ini adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

*“A member of the United Nations which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization shall have no vote in the General*

---

<sup>15</sup> A. Roy Bennet, International Organization , edisi ke II (New Jersey: Prentice Hall, Inc.,1980), hal 106-107. Dikutip dari Sumaryo Suryokusumo, “Organisasi Internasional”, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987. hal 9

<sup>16</sup> Ibid , hal 9-10

<sup>17</sup> Ibid , hal 51

<sup>18</sup> Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice (New York: Office of the Public Information), Pasal 19. Dikutip dari Sumaryo Suryokusumo, “Organisasi Internasional”, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987. Hal 51



*Assembly of the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. The General Assembly may, nevertheless, permit such a member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the member”.*

Sebaliknya partisipasi negara bukan anggota juga dimungkinkan jika negara itu menjadi salah satu pihak yang berselisih dan perselisihan itu dibicarakan oleh Dewan Keamanan. Namun partisipasi itu hanya terbatas pada kesempatan berbicara mengemukakan dan menjelaskan persoalannya, tanpa ikut serta dalam pemungutan suara. Ketentuan mengenai hal ini adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

*“...any state which is not a Member of the United Nations, if it is a party to a dispute under consideration by the Security Council, shall be invited to participate, without vote, in the discussion relating to dispute. The Security Council shall lay down such conditions as it deems just for the participation of a state which is not a Member of the United Nations”.*

Sebaliknya bagi negara bukan anggota PBB pun menurut Pasal 32 dimungkinkan bagi negara bukan anggota PBB dapat berpartisipasi dalam persidangan Dewan Keamanan, jika negara itu menjadi salah satu pihak bersengketa yang sedang diperdebatkan Sidang Dewan Keamanan PBB, walaupun tanpa hak suara. Pasal 31 dan Pasal 32 Piagam PBB mengakui adanya prinsip bahwa pihak-pihak yang berkepentingan haruslah diberi kesempatan menyampaikan kesempatan menyampaikan pandangan mereka sebelum suatu putusan diambil. Jika dua pasal tersebut dibandingkan, sebenarnya ada perbedaan yang penting. Di satu pihak, Pasal 32 menyatakan bahwa partisipasi

---

<sup>19</sup> Ibid., Pasal 32. Dikutip dari Sumaryo Suryokusumo, “Organisasi Internasional”, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987. Hal 51-52



itu hanya ditujukan pada negara-negara yang terlibat di dalam persengketaan dan sedang diperdebatkan Dewan Keamanan, baik sebagai anggota maupun bukan anggota PBB. Dengan demikian kedudukan dan hak anggota maupun bukan anggota itu sama, yakni sama-sama berpartisipasi yang terbatas hanya pada hak untuk mengemukakan pandangan-pandangan yang bertalian dengan masalah yang sedang dibicarakan. Sementara itu, Pasal 31 hanya ditujukan pada anggota PBB untuk memungkinkan negara berpartisipasi walaupun negara itu tidak terlibat. Namun demikian, Dewan Keamanan lebih dahulu memperhatikan apakah partisipasi itu benar-benar ada pengaruhnya.<sup>20</sup>

Setiap anggota Dewan Keamanan memiliki satu suara. Keputusan mengenai masalah prosedural ditentukan berdasarkan suara mendukung paling tidak 9 negara dari 15 negara anggota Dewan Keamanan. Keputusan mengenai masalah penting memerlukan 9 suara mendukung, termasuk suara setuju dari semua anggota tetap. Inilah yang dinamakan kesatuan negara besar yang sering disebutkan hak "*veto*". Semua anggota tetap sudah pernah melaksanakan hak *veto* pada satu atau lain kesempatan. Apabila satu negara anggota tetap mendukung suatu keputusan atau namun tidak mau memblokirnya dengan *veto*, maka negara tersebut bisa bersifat abstain.<sup>21</sup>

Apabila pertikaian menyebabkan pertempuran, maka kepedulian Dewan Keamanan PBB yang utama adalah secepat mungkin bisa menghentikannya.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 52-53

<sup>21</sup> Kantor Penerangan PBB, *op.cit*.hal, 14

Sejak berdirinya PBB, Dewan Keamanan banyak sekali mengeluarkan ketentuan mengenai gencatan senjata yang sangat penting dalam mencegah meluasnya pertikaian di berbagai belahan bumi. Dewan juga mengirimkan pasukan perdamaian PBB untuk membantu mengurangi ketegangan di wilayah-wilayah yang berada dalam keadaan genting, melerai pasukan-pasukan yang saling berhadapan dan menciptakan keadaan yang tenang dimana penyelesaian damai bisa diupayakan. Dewan bisa melaksanakan sanksi-sanksi ekonomi, misalnya embargo ekonomi dan juga tindakan militer secara kolektif.<sup>22</sup>

Sesuatu negara yang terkena tindakan pencegahan atau pelaksanaan paksa sesuatu keadaan ketentuan Dewan Keamanan, bisa ditunda hak *privilise* keanggotaannya oleh Dewan Keamanan. Sesuatu negara yang terus-menerus melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB bisa dikeluarkan dari keanggotaan PBB oleh Majelis berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan.<sup>23</sup>

Prosedur pemungutan suara dikemukakan dalam Pasal 27, yaitu:

- 1) Setiap anggota Dewan Keamanan memiliki satu suara
- 2) Keputusan Dewan Keamanan mengenai masalah-masalah prosedural harus ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal, 16

<sup>23</sup>*Ibid*, hal 16



- 3) Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lainnya diputuskan dengan melalui suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara bulat dari anggota-anggota tetap dengan ketentuan bahwa dalam keputusan-keputusan berdasarkan Bab VI, dan menurut Ayat (3) Pasal 52 pihak yang bersengketa tidak diperkenankan memberikan suaranya.<sup>24</sup>

Perbedaan antara prosedur-prosedur yang tercantum dalam ayat (2) dan (3) terletak perbedaan antara “masalah-masalah prosedural” dan “semua permasalahan lainnya”. Akan tetapi tidak terdapat penjelasan rinci mengenai masalah-masalah apakah yang termasuk dalam kedua kategori ini jika dibandingkan dengan penjelasan mengenai “masalah-masalah penting” dalam Pasal 18 Piagam PBB, yang mencakup pemungutan suara dalam Majelis Umum.<sup>25</sup> Dewan Keamanan dengan demikian diharapkan pada persoalan untuk memutuskan mengenai ke dalam kategori mana suatu keputusan tertentu harus dimasukkan. Dalam praktek beberapa masalah tertentu ditetapkan sebagai masalah prosedural<sup>26</sup>, akan tetapi jika timbul perselisihan pendapat, para

---

<sup>24</sup> D.W. Bowet, *op.cit*, hal, 36

<sup>25</sup> D.W. Bowet, *op.cit*, hal, 36

<sup>26</sup> Seperti juga International Atomic Energy Agency yang dapat memperkuat petunjuk dari ketentuan-ketentuannya baik dengan menanggukkan hak-hak istimewa dan hak-hak keanggotaan ataupun dengan membatasi atau menghentikan bantuan yang diberikan Agency ataupun meminta kembali bahan-bahan baku dan peralatan-peralatan yang telah diberikan: Statuta , pasal 9 dan 12 (A) (7) (Peaslee, hal. 926).  
*Dikutip dari D.W. Bowet, op.cit, hal, 38*

anggota tetap menyadarkan kepada pernyataan empat anggota sponsor di San Fransisco<sup>27</sup> yang menyatakan:

- 1) Menurut pendapat para delegasi, pemerintah-pemerintah sponsor, rancangan piagam itu berisi suatu petunjuk pelaksanaan prosedur-prosedur pemungutan suara pada fungsi-fungsi Dewan Keamanan.
- 2) Dalam hal ini, tidak akan mungkin terjadi di masa mendatang suatu masalah yang sangat penting mengenai apakah suatu keputusan yang dibuat akan diterapkan pemungutan suara. Namun, jika timbul masalah demikian, keputusan yang berkenaan dengan masalah pendahuluan (*preliminary question*), yaitu apakah suatu masalah termasuk hal prosedural atau bukan, harus ditetapkan melalui suara tujuh anggota Dewan Keamanan, termasuk suara bulat dari anggota tetap.

Uni soviet dengan berdasarkan atas ayat kedua ini bersikeras bahwa keputusan bagi "*preliminary question*" dilakukan tanpa pemungutan suara prosedural, mempergunakan veto untuk menentukan masalah-masalah utama bukan prosedural. Lalu dalam pemungutan suara berikutnya mengenai masalah

---

<sup>27</sup> Namun demikian, Sekretaris Jenderal telah menyatakan pendapatnya (yang ditentang oleh Uni Soviet) bahwa penangguhan adalah otomatis kecuali (a) ada penentangan atas ketepatan perhitungan beban keuangan atau (b) ada petisi-petisi Negara anggota kepada majelis untuk menggunakan kebijaksanaannya guna menghapuskan sanksi tersebut (A/7111, A/7146). *Dikutip dari D.W. Bowet, op.cit*, hal, 38



utama pokok, Uni Soviet menjatuhkan veto kedua, dengan demikian dilakukan “*double veto*”. Praktek ini, jika diambil kesimpulan secara absurd, memperlihatkan bahwa tidak ada suatu masalahpun yang bisa dianggap sebagai masalah prosedural apabila bertentangan dengan kehendak salah satu anggota tetap. Dengan demikian bertentangan dengan pernyataan yang dikutip diatas yang menyatakan bahwa jalan pemungutan suara mengenai *prelimanary questions* hanya dilakukan jika Piagam tidak memberikan petunjuk tentang hakikat masalah tersebut. Pada kenyataannya charter dalam Bab IV, V, X dan XI memakai judul “prosedur” untuk ketentuan pasal-pasal berbeda, dan ini bersama dengan penerapan dengan ketentuan-ketentuan dengan penafsiran perjanjian yang dipakai termasuk analogi, seringkali memberikan jawaban tanpa harus dilakukan pemungutan suara untuk masalah pendahuluan demikian. Suatu cara untuk menghilangkan *double veto* adalah menyerahkan kepada ketua Dewan Keamanan untuk menentukan suatu masalah termasuk prosedural atau bukan. Menurut ketentuan 30 *Rules of Procedures* aturan itu berlaku jika sembilan anggota mendukungnya dan tidak ada kesempatan menggunakan hak veto. Kelayakan pelaksanaannya bergantung pada kecerdikan dan kejujuran delegasi yang duduk di kursi pimpinan Dewan Keamanan.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 23 Ayat (3) Piagam PBB, syarat suara bulat sembilan anggota “termasuk suara persetujuan anggota-anggota tetap” mengakibatkan

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hal, 38-39

dimungkinkan kekuatan satu anggota tetap mencegah pengambilan keputusan yang didukung mayoritas dewan, yaitu sembilan anggota dengan suara tunggalnya. Kekuatan ini, yaitu Kekuasaan veto, merupakan alat yang sering merusak citra Dewan Keamanan dan anggota-anggota tetap itu tidak segan-segan mempergunakan hak vetonya apabila mereka menganggap bahwa kepentingan-kepentingan vital mereka terancam.<sup>29</sup>

Dalam beberapa kasus, para anggota tetap bersikap abstain dalam pemungutan suara daripada memberikan suara negatif yang akan menghalangi Dewan Keamanan mengambil suatu keputusan. Praktek "*absteintion*" walaupun tidak dinyatakan dalam Pasal 27 yang mungkin dengan mudah ditambah "hadir dan memberikan suara" umumnya telah diterima dan sekarang ini harus dipandang sebagai suatu interpretasi yang valid secara konstitusional dari maksud "konkurensi". Dikatakan bahwa praktek abstaintion ini bukan hanya tidak diperngaruhi oleh perubahan Piagam terhadap Pasal 27, tetapi suatu pemungutan suara non-prosedural mungkin saja diambil putusan dengan suara abstain semua anggota tetap.<sup>30</sup> Sungguhpun Portugal mengemukakan masalah yang sebenarnya kepada Sekretaris Jenderal mengenai Resolusi Dewan Keamanan Nomor 221 Tahun 1966 Tentang Rhodesia (yang mana dalam kesempatan itu dua anggota tetap bersikap abstain), namun Sekteraris Jenderal menolak memberikan suatu pendapat resmi bahwa Dewan Keamananlah yang

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 39

<sup>30</sup> Lihat secara umum Nagendra Singh, *Termination of Membership of International Organization* (1958). Dikutip dari D.W. Bowet, *op.cit*, hal, 39



berhak untuk menafsirkan resolusi-resolusinya yang menyangkut prosedur-prosedur. Sudah tentu masalah utamanya adalah apabila suatu resolusi disetujui semua anggota tetap, tapi juga mengikat sampai sejauh hal tersebut berlanjut berwujud suatu keputusan yang berisi perintah sesuai Bab VII. Masalah ini masih belum terselesaikan dalam prakteknya. Meskipun *Internasional Court Of Justice* tahun 1971 tidak secara khusus menguraikan, masalah ini dalam *advisory opinion*-nya mengenai konsekuensi hukum bagi negara-negara terhadap pendudukan secara terus-menerus Afrika Selatan di Namibia, membenarkan praktek abstain oleh anggota tetap sebagai “tidak merupakan suatu kendala terhadap penerimaan resolusi-resolusi”.<sup>31</sup>

Suatu masalah yang rumit timbul apabila keputusan diambil dengan ketidakhadiran anggota tetap. Kasus-kasus yang terjadi dimana Dewan Keamanan mengambil suatu keputusan mengenai masalah prosedural dengan tidak hadirnya anggota tetap tidak ada keberatan diajukan,<sup>32</sup> hanya dalam keputusan-keputusan prosedural dimana persetujuan disyaratkan, baru timbul kesulitan yang sesungguhnya. Sebenarnya keputusan tanggal 25 dan 27 Juni 1956 yang menetapkan adanya pelanggaran perdamaian di Korea dan mengusulkan negara-negara anggota untuk mengangkat senjata membantu

---

<sup>31</sup> Mengenai argumen yang menentang lihat Feinburg, “Unilateral Withdrawal from an International Organisation” B.Y.B.I.L 39 (1963), hal 215. Dikutip dari D.W. Bowet, *op.cit*, hal, 39-40

<sup>32</sup> UNCIO, Doc.1178. I/2/76/6(2), hal. 5: lihat secara umum Kelsen, *Law of the UN*. Bab 7. Dikutip dari D.W. Bowet, *op.cit*, hal, 40

Korea Selatan, diambil tanpa kehadiran Uni Soviet, yang kemudian menjadikan keputusan itu tidak sah. Perlu ditambahkan, meskipun Uni Soviet melanggar Pasal 28 yang menuntut “selalu hadir setiap saat pada kursi organisasi” ada beberapa kesulitan dalam menyatakan bahwa pelanggaran ini atau preseden-preseden abstain dan bentuk ketidakhadiran pada suatu pelanggaran pada suatu pemungutan suara prosedural, mensahkan pengambilan keputusan, jika anggota tetap menyatakan abstain dari penggunaan veto dapat dikatakan terjadi suatu persetujuan secara “diam-diam” terhadap kehendak mayoritas, akan tetapi hal ini tidak dapat diterapkan apabila anggota itu sama sekali tidak hadir. Pembeneran politis untuk keputusan itu adalah suatu masalah tersendiri dari validitas konstitusional tersebut.<sup>33</sup>

Pasal 27 Ayat (3) Piagam PBB tidak memuat suatu ketentuan yang menentukan absatain sebagai suatu keharusan, dikatakan bahwa “dalam keputusan-keputusan di bawah Bab VI dan di bawah Pasal 52 Ayat (3) Piagam, pihak yang bersengketa tidak diperkenankan memberikan suara”. Ini merupakan suatu pernyataan kembali prinsip umum hukum *Nemo Judex in sua Causa*, meskipun batasan persengketaan diuraikan menurut ketentuan-ketentuan khusus. Tidak akan diperpanjang masalah penuntutan eksistensi suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi menurut Bab VII Pasal 39 Piagam, walaupun disitu mungkin terdapat

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal, 40-41



suatu perselisihan yang lengkap mengenai masalah ini. Namun demikian, dalam masalah yang sangat vital ini, tidak terdapat keharusan untuk abstain dan anggota tetap dapat menggunakan veto untuk menghalangi keputusan bahwa dirinya (atau suatu negara lain yang didukungnya) dinyatakan bersalah melakukan agresi.<sup>34</sup>

Praktek *Council/ Dewan* sebelumnya memperlihatkan suatu tendensi untuk mendiskusikan tentang apakah yang termasuk dalam suatu persengketaan (sebagai lawan dari suatu situasi), apakah keputusan yang timbul berasal dari Bab VI dan apakah suatu negara tertentu merupakan pihak. Sejak tahun 1947 analisis legalistik ini kehilangan daya tariknya dan para anggota Dewan Keamanan telah abstain tanpa mendukung Dewan untuk menentukan apakah suatu kewajiban hukum harus selalu ada.<sup>35</sup>

#### **4. Fungsi Dan Kewenangan Dewan Keamanan PBB**

Mengenai hal ini dikemukakan dalam Pasal 24-26 Piagam PBB. Dalam memberikan kepada Dewan “tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan Internasional”, para anggota organisasi bersepakat bahwa “bertindak atas nama mereka”. Karenanya Dewan bertindak sebagai wakil seluruh anggota dan tidak terbebas dari kehendak-kehendak mereka mereka, selanjutnya ia pun terikat oleh tujuan-tujuan dan prinsip organisasi, sehingga

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hal, 41

<sup>35</sup>*Ibid*

pada prinsipnya, ia tidak dapat bertindak sewenang-wenangnya dan tidak terkekang oleh pembatasan-pembatasan. Pada saat yang sama apabila Dewan bertindak *intravires* (dalam batas kewenangannya), anggota-anggota organisasi terikat oleh tindakannya dan menurut Pasal 25 Piagam, mereka setuju menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini. Persetujuan ini tidak mencakup keputusan keputusan yang hanya bersifat rekomendasi sebagai lawan dari suatu “keputusan”.<sup>36</sup>

Walaupun Pasal 24 Ayat (2) menunjuk “kepada kekuasaan khusus yang diberikan. . . .” dalam Bab VI, VII, VIII dan XII, praktek yang dianggap berlaku saat ini banyak yang tidak dipakai. Terdapat kekuasaan tidak langsung/*implied* yang diperlukan dalam pelaksanaan seluruh tanggung jawab Dewan.<sup>37</sup>

Fungsi utama Dewan Keamanan memelihara perdamaian dan keamanan Internasional dilakukan dengan dua cara, yang pertama adalah penyelesaian secara damai sengketa-sengketa Internasional yang dipandang mengancam perdamaian dan keamanan Internasional dan yang kedua adalah dengan tindakan pemaksaan (yaitu jika cara pertama dianggap gagal atau tidak memadai).<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal, 41-42

<sup>37</sup> *Ibid*, hal, 42

<sup>38</sup> *Ibid*, hal, 42



#### a) Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Bab IV mengemukakan banyak cara yang dapat membantu Dewan Keamanan dalam menyelesaikan persengketaan-persengketaan dan sebagaimana dijelaskan Pasal 33 Piagam PBB, metoda-metoda dalam Bab IV merupakan tambahan terhadap metoda-metoda tradisional yang telah ada dalam hukum Internasional dan dengan mana para pihak harus menggunakannya terlebih dahulu dari cara-cara lain (*first of all*) secara tepat. Selain itu, cara-cara tersebut hanya dilakukan Dewan Keamanan terhadap sengketa-sengketa yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan bukan seluruh sengketa.<sup>39</sup>

Yang terikat inilah mempunyai hak untuk mengajukan persengketaan –persengketaan kepada Dewan Keamanan, Majelis Umum (Pasal 11 dan 12 Piagam PBB), Sekretaris Jenderal (Pasal 99 Piagam), negara-negara anggota (Pasal 35 Ayat (1) Piagam) dan negara-negara bukan anggota (Pasal 35 Ayat (2) ). Perlu dicatat bahwa negara-negara bukan anggota jika mengajukan sengketa, terikat untuk menerima kewajiban-kewajiban penyelesaian secara damai yang diatur dalam Piagam ini dalam mengajukan dan maksud dari pengajuan sengketa. Juga dalam hal ini terdapat suatu tugas/kewajiban yang dipikul para pihak dalam suatu persengketaan yang mengancam perdamaian dan keamanan

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hal, 42

Internasional untuk mengajukan persengketaan kepada Dewan Keamanan apabila mereka tidak dapat menyelesaikannya melalui cara-cara tradisional seperti dinyatakan dalam Pasal 33 Piagam, ini diatur dalam Pasal 37, akan tetapi dianggap hanya berlaku terhadap negara-negara anggota dan tidak terhadap negara bukan anggota.<sup>40</sup>

Sekali itu, sengketa diajukan, tidak serta merta dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan, tetapi Dewan Keamanan memutuskan sendiri melalui suara mayoritas 9 anggota, apakah hal tersebut dimasukkan atau tidak ke dalam agenda tanpa melalui batas wewenangnya. Ada kemungkinan bahwa Dewan Keamanan setelah mempertimbangkan masalah itu, memutuskan bahwa sengketa itu tidak mempunyai sifat Internasional, dengan perkataan lain hal ini terhambat dalam hal pelaksanaan yuridiksi berdasarkan klausula yuridiksi domestik pada Pasal 2 Ayat (7). Demikian halnya juga bagi Dewan Keamanan sendiri untuk memutuskan apakah dan bilamana suatu persengketaan akan dihapus dari agenda, kembali harus melalui prosedur pemungutan suara.<sup>41</sup>

Apabila diputuskan adanya suatu sengketa Dewan Keamanan terikat menurut Pasal 32 mengundang pada pihak untuk turut serta dalam perundingan (namun tanpa hak suara), Dewan Keamanan boleh

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hal 42-43

<sup>41</sup>*Ibid*, hal 43



mengundang negara-negara anggota menurut Pasal 31 Piagam untuk turut serta dalam perundingan mengenai suatu masalah baik yang merupakan sengketa ataupun bukan, apabila Dewan Keamanan menganggap kepentingan suatu negara secara khusus terpengaruh. Lazimnya Dewan Keamanan tidak terpaku pada pernyataan-pernyataan para pihak. Dewan Keamanan dapat melakukan penyelidikan sendiri menurut Pasal 34 dengan menggunakan organ subsider untuk tujuan tersebut. Apabila maksud penyelidikan seperti dinyatakan Pasal tersebut, Dewan Keamanan tidak diperkenankan untuk mempergunakan kewenangan umum yang dimilikinya menurut Pasal 29 untuk membentuk badan-badan pembantu. Menurut Pasal 29 pemungutan suara adalah prosedur, sedang menurut Pasal 34 hal itu bukan prosedur dan keputusan Dewan untuk menyelidiki suatu persengketaan sebagaimana disepakati di San Fransisco, harus dibuat hanya apabila disetujui oleh kelima anggota tetap. Tidak ada uraian kewajiban hukum dalam Piagam yang mengharuskan sesuatu negara tunduk pada keputusan Dewan Keamanan dalam hal yang menyangkut pengizinan suatu komisi penyelidik memasuki wilayahnya. Memang tanpa memasuki wilayah negara, negara/harga suatu komisi penyelidik akan sangat kurang dan dapat dikatakan bahwa suatu kewajiban demikian ada berdasarkan syarat-syarat umum Pasal 25.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal, 43-44

Dalam hubungannya dengan suatu persengketaan Dewan Keamanan mempunyai banyak cara alternatif untuk memulai pemrosesannya. Ia dapat, menurut Pasal 33 Ayat (2) meminta para pihak untuk menggunakan cara-cara tradisional, menyerahkan pilihan atau cara khusus kepada kedua belah pihak. Atau menurut Pasal 36 Ayat (1) Dewan Keamanan dapat mengusulkan suatu cara penyelesaian tertentu, tetapi dengan mempertimbangkan bahwa “persengketaan-persengketaan hukum sebagaimana umumnya akan diajukan oleh para pihak kepada International Court of Justice” (Pasal 36 Ayat (3)). Dewan Keamanan juga dapat bertindak secara jauh dan menurut Pasal 37 Ayat (2) menganjurkan tata cara yang aktual dari penyelesaian.<sup>43</sup>

Sebagai tambahan terhadap cara atau prosedur untuk penyelesaian; ini sama dengan melakukan suatu fungsi “quasi-judicial” apabila persengketaan itu mempengaruhi hak-hak hukum para pihak. Cara kerja seperti ini hanya dilakukan apabila sengketa itu oleh Dewan Keamanan dianggap mengancam perdamaian dan keamanan Internasional; sebaliknya Dewan Keamanan, menurut Pasal 38, hanya dapat bertindak demikian berdasarkan persetujuan semua pihak. Sebuah alternatif terakhir bagi Dewan Keamanan adalah membentuk *machinery* penyelesaian dalam kerangka PBB seperti Komite Jasa-Jasa Baik

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal, 44



(*Committee for Good Offices*) di Indonesia tahun 1947 atau Mediator antara India dan Pakistan dalam sengketa Kashmir atau mengajukan kepada suatu organ yang telah ada, seperti dilakukan Dewan Keamanan dalam mengajukan masalah Palestina kepada Majelis Umum.<sup>44</sup>

Jalan apapun yang dipakai berdasarkan Bab IV, semua itu diterapkan melalui suatu keputusan non-prosedural. Justifikasi untuk ini terletak dalam apa yang disebut teori *chain of events*, yaitu pengakuan bahwa anggota tetap dapat mempergunakan veto terhadap tindakan pengukuhan, perlu pula untuk mengakui veto berupa dalam masalah-masalah penyelesaian secara damai jika anggota tetap sebaliknya akan melakukan cara tindakan di luar kehendaknya yang pada akhirnya dapat mengarah kepada dilakukannya tindakan pemaksaan. Anggota tetap dalam cara apapun yang telah dipakai dalam Bab IV, dapat mengeluarkan vetonya untuk mencegah keputusan penentuan “suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi” berdasarkan Pasal 39 tanpa ada satupun tindakan pemaksaan menurut Bab VII dapat diterapkan.<sup>45</sup>

Satu hal terakhir yang mesti dicatat dalam kaitannya dengan Bab VII dan bahwa kewenangan-kewenangan Dewan Keamanan membuat rekomendasi. Hal-hal ini tidak mengikat atas negara-negara kepada siapa

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hal, 44-45

<sup>45</sup>*Ibid*, hal, 45

rekomendasi itu ditujukan, karena pasal 25 hanya berkaitan dengan keputusan, oleh karena itu rekomendasi Dewan Keamanan kepada para pihak dalam kasus sengketa Corfu Chanel, yang mereka ajukan sengketanya kepada International Court of Justice, oleh mayoritas hakim tidak dipandang sebagai suatu penciptaan kewajiban hukum yang diajukan kepada yurisdiksi Mahkamah.<sup>46</sup>

**b. Tindakan Pemaksaan**

Perbedaan mencolok antara Covenant Liga Bangsa-Bangsa dan Piagam PBB terletak pada tingkat sentralisasi kepada Dewan organ eksekutif dengan keanggotaan terbatas menurut. Menurut Liga setiap anggota mempunyai hak sendiri untuk menentukan apakah suatu negara tertentu akan mengambil jalan peperangan dalam menerobos *Convenant*, dan juga apakah ia mentaati atau tidak rekomendasi *Council*. Pada PBB Dewan Keamanan memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 39 untuk menentukan, atas nama organisasi secara keseluruhan, apakah ada suatu ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, tindakan agresi atau tidak dan keputusan-keputusannya mengenai suatu tindakan pemaksaan yang diambil, setidaknya-tidaknya secara teoritis, mengikat atas negara-negara anggota berdasarkan Pasal 25.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*, hal, 45-46



Dewan Keamanan memiliki dua jenis tindakan pemaksaan yang diberikan kepadanya, yaitu yang dimuat dalam Pasal 41, yakni yang tidak melibatkan kekuatan senjata, dan yang dimuat dalam pasal 42, yakni yang melibatkan tindakan angkatan udara, laut, atau angkatan darat. Sebelum memutuskan hal itu perlu bagi Dewan untuk menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi berdasarkan Pasal 38.

Penentuan ini sebagaimana semua keputusan berdasarkan Bab VII, hanya dapat dibuat melalui pemungutan suara non-prosedural. Oleh karena itu, suara bulat dari anggota-anggota tetap menjadi hal yang sangat esensial dan adalah mustahil bahwa suatu tindakan pemaksaan yang dapat diambil berdasarkan Bab VII bertentangan dengan kehendak anggota-anggota tetap atau negara lain yang mendapat dukungan mereka; hasilnya sudah tentu veto. Karena alasan inilah, terutama bahwa tindakan yang dimuat dalam Bab VII sesungguhnya tidak bermanfaat dalam abab dimana ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan-tindakan agresi terjadi dalam situasi dimana terdapat suatu konflik kepentingan khususnya antara Amerika dan Uni Soviet, dan sebagai akibatnya tidak ada kebulatan suara diantara anggota-anggota tetap. Karena itulah setelah persoalan Indonesia tahun 1947 (dimana ada kebulatan suara) dan sampai terjadinya krisis Kongo Juli 1960 tidak ada

lagi kesempatan dimana kesempatan dimana Dewan Keamanan secara efektif mempergunakan kekuasaannya berdasarkan Bab VII, kecuali terhadap Korea di tahun 1950, dan ini pun hanya kebetulan Uni Soviet tidak hadir. Krisis-krisis selanjutnya mengenai Berlin, Palestina, Hungaria, Suez sebagai contoh acak-acakan, semuanya melibatkan kepentingan Timur-Barat, dan karenanya Dewan Keamanan tidak pernah menggunakan kekuasaan pemaksaannya.

Konflik Timur-Barat telah merusak prinsip kebulatan suara yang mana keseluruhan struktur Bab VII (dan termasuk PBB sendiri) menggantungkan untuk bisa bekerja sebagaimana dikehendaki menurut Piagam. Secara keseluruhan, krisis Kongo memperlihatkan suatu contoh yang unik dari suatu situasi yang menuntut dilakukan tindakan PBB tetapi tidak melibatkan konflik Timur-Barat. Karena itulah tiga resolusi penting 14 Juli, 22 Juli dan 9 Agustus berasal dari Dewan Keamanan, yang memungkinkan Sekretaris Jenderal memberikan bantuan militer kepada pemerintah Kongo. Memang tindakan itu meskipun bukan tindakan yang dikenakan itu bukanlah “tindakan pemaksaan” menurut Pasal 41 atau Pasal 42 akan tetapi berupa tindakan-tindakan sementara (*provisional measures*) yang dinyatakan pasal 40, namun itu belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan awal keberhasilan digunakannya kekuasaan berdasarkan Bab VII oleh Dewan Keamanan. Bagaimanapun, pada



waktunya konflik antara Timur dan Barat timbul dan dengan berkurangnya kontrol efektif kebulatan suara yang dikenakan terhadap Majelis, dibicarakan dalam sidang darurat berdasarkan prosedur "*Resolution on Uniting for Peace*" oleh Dewan Keamanan tanggal 7 September 1960, menghadapi veto Uni Soviet dan Polandia.

Beberapa kemiripan kebulatan suara atau setidaknya tidaknya ketiadaan veto timbul sekama Dewan Keamanan menangani urusan Rhodesia. Resolusi 9 April 1966 (221/1966) 16 Desember 1966 (232/1966) dan 29 Mei 1968 (252/1968) menggambarkan sanksi-sanksi berdasarkan Bab VII, dua resolusi yang disebut terdahulu sebenarnya secara spesifik meminta diterapkannya Pasal 39 dan 41. Pada tanggal 7 November 1977 Dewan Keamanan juga dengan surat bulat menjatuhkan embargo senjata terhadap Afrika Selatan berdasarkan Bab VII. Bagaimanapun, sebagai suatu ketentuan umum, memang benar bahwa veto selalu menghalangi/menghambat kekuasaan pemaksaan oleh Dewan Keamanan, sehingga pembahasan lebih lanjut tentang Bab VII dilakukan secara sepiantas. Perlu ditekankan bahwa sampai akhir tahun 1980 sanksi yang benar-benar dijatuhkan oleh Dewan Keamanan dan merupakan perintah terhadap seluruh anggota, hanyalah sanksi ekonomi terhadap Rhodesia dan Afrika Selatan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hal, 46-48

Penentuan suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi menurut pasal 39 harus mendahului kekuasaan Dewan Keamanan berdasarkan Pasal 41 dan 42, baik pasal-pasal itu disebutkan secara spesifik ataupun tidak. Dengan mengecualikan Resolusi 232 (1966) dan 252 (1968) mengenai Rhodesia, lazimnya Dewan Keamanan menghindari penunjukan secara spesifik terhadap pasal tersebut (biasanya secara insidental, tidak membatasi pada pasal 39), juga dalam menentukan bahwa serangan bersenjata terhadap Republik Korea merupakan suatu pelanggaran perdamaian.

Dewan Keamanan dalam Resolusinya tanggal 25 Juli 1950 tidak menunjuk secara spesifik pasal 39. Ada dua kesulitan penentuan dalam penentuan ini. Pertama, adalah perdamaian yang dimaksud Dewan Keamanan harus bermakna perdamaian Internasional. Adalah bertentangan dengan tujuan Piagam PBB jika menganggap bahwa Dewan Keamanan dapat mencampuri secara paksa suatu persengketaan sipil yang tidak merupakan ancaman perdamaian dan keamanan Internasional, dan baik dalam masalah Korea maupun masalah Indonesia sebelumnya argumen yang dikemukakan adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan jelas menyalahi berdasarkan bahwa tindakan itu mencampuri yuridiksi negara tersebut. Namun demikian argumentasi terhadap kedua kasus tersebut ditolak dengan tegas.



Dalam kasus Kongo, walaupun Dewan Keamanan dimungkinkan untuk bertindak berdasarkan Pasal 40, dan walaupun dalam hal ini ada permintaan khusus dari pemerintah untuk dilakukan campur tangan PBB, perlu diingat juga bahwa prinsip non-intervensi menjadi pedoman Sekretaris Jenderal ketika mengintruksi pasukan PBB untuk tidak mencampuri pergolakan Internal memperebutkan kekuasaan politik dengan membatasi tindakan pasukan PBB untuk membatasi hukum dan ketertiban, perlindungan jiwa manusia serta mengurangi unsur-unsur asing (terutama pasukan Belgia dan sewaan) yang cenderung menciptakan suatu ancaman terhadap perdamaian Internasional. Kesulitan yang kedua, timbul karena ketiadaan definisi untuk istilah yang dipakai dalam Piagam PBB, yakni ancaman terhadap perdamaian dunia, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi. Kekurangan ini adalah disengaja. Di San Fransisco sengaja diberikan keleluasaan kepada Dewan Keamanan dan meskipun dalam resolusi 3314 (XXIX) tahun 1974, Majelis Umum berhasil membuahkan suatu definisi tentang agresi, ini hanyalah berupa pedoman bagi Dewan dan daftar tindakan-tindakan agresi kurang begitu lengkap. Dalam praktek untuk masalah itu mendapat fakta yang akurat berdasarkan kejadian, daripada hanya suatu definisi hukum, dan dalam perkara Korea Dewan Keamanan mempercayakan sepenuhnya atas laporan UNCOK (*United Nation Commission on Korea*)

di Korea. Seperti halnya pada pertimbangan situasi di Libanon tahun 1958 Dewan Keamanan mempercayakan sepenuhnya atas laporan UNOGIL (*United Nation Observa Group in Libanon*). Kehadiran kelompok-kelompok demikian merupakan suatu keuntungan besar dan sebagaimana telah diusulkan, Dewan Keamanan berdasarkan Pasal 34 memiliki kekuasaan penuh untuk mengirim sebuah komite atau kelompok yang belum pernah satupun terwujud.<sup>49</sup>

Praktek Dewan Keamanan agak memberi kesan bahwa kekuasaan berdasarkan Pasal 40 untuk memaksa para pihak agar mentaati tindakan-tindakan sementara tidak bergantung atas suatu keharusan adanya penentuan terlebih dahulu berdasarkan Pasal 39. Dalam masalah Palestina, Pasal 40 disebut secara spesifik, yaitu untuk suatu gencatan senjata dan meminta penarikan diri ke belakang garis gencatan senjata sementara, tindakan serupa itu dilakukan Dewan Keamanan di Kashmir. Di Kongo, banyak bukti baik dalam kaitan permintaan bantuan oleh pemerintah Kongo pun dalam pernyataan-pernyataan para wakil dalam Dewan Keamanan bahwa telah terjadi suatu ancaman terhadap perdamaian Internasional, tidak dilakukan penunjukan spesifik atas Pasal 39. Resolusi-resolusi Dewan Keamanan karenanya dimungkinkan atas dasar Pasal 40. Masalah mengenai apakah suatu resolusi yang

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hal, 48-49



menentukan negara-negara atau badan lain agar mematuhi tindakan-tindakan sementara merupakan keharusan, tidak dapat dijawab secara teoritis. Akan tetapi, jelas bahwa dalam tiga resolusi, yaitu tanggal 14 Juli, 22 Juli dan 9 Agustus dianggap sebagai perintah, dalam kesimpulan Sekretaris Jendral dikatakan bahwa penerapan Pasal 25 dan telah ditegaskan dalam resolusi tanggal 9 Agustus itu. Kedua pasal tersebut berkenaan dengan keputusan-keputusan Dewan Keamanan yang tentu saja mengikat seluruh anggota. Tindakan-tindakan sementara yang diperintahkan berdasarkan Pasal 40 tidak boleh merugikan hak-hak para dan tindakan itu hanyalah suatu cara untuk menghindarkan suatu kegentingan keadaan dan Dewan Keamanan dapat mempertimbangkan suatu kelalaian dalam keadaan mentaati tindakan-tindakan sementara itu.<sup>50</sup>

Hal yang terpenting dalam skema yang terlukis dalam Bab VII terletak pada ketentuan bagi Dewan Keamanan jika menganggap perlu mengerahkan angkatan bersenjata untuk melaksanakan keputusannya terhadap negara-negara yang membandel dan ini diperkuat dengan perjanjian-perjanjian antara negara-negara anggota Dewan Keamanan, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 43. Dengan ketiadaan perjanjian demikian yang pernah dibuat, Dewan Keamanan seakan kurang memiliki

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hal, 49-50

gigi untuk menggigit, dan Komite Staf Militer yang diatur dalam Pasal 46 dan 47 (meskipun didirikan sejak 1947) tidak mempunyai fungsi riil karena tujuan didirikannya Komite itu adalah untuk membuat rencana penggunaan angkatan bersenjata serta memberikan nasehat dan membantu Dewan Keamanan dalam memastikan pasukan dengan pembagian yang semestinya. Akan tetapi ketiadaan perjanjian-perjanjian menurut Pasal 43 itu tidak menghalangi negara-negara anggota untuk membuat perjanjian *ad hoc*, dan dalam hubungan dengan keadaan khusus, untuk menempatkan pasukan dengan pengaturan Dewan Keamanan. Hal ini terjadi ketika Komando PBB dibentuk di Korea tahun 1950 dan ketika pasukan PBB dibentuk di Kongo. Namun demikian, ketergantungan pada sumbangan sukarela (*voluntary contribution*) tidak dengan begitu saja dapat menjadi jaminan keefektifan.<sup>51</sup>

Kegagalan Dewan Keamanan memenuhi tujuan utamanya yaitu memelihara perdamaian dan keamanan Internasional telah membawa pada tiga perkembangan penting. Yang pertama, adalah diterimanya suatu peranan oleh Majelis Umum yang sudah barang tentu sebelumnya tidak diperkirakan, yaitu menentukan suatu pelanggaran perdamaian atau suatu tindakan agresi dan mengusulkan tindakan oleh para anggota, termasuk penggunaan angkatan bersenjata. Kedua, berkembangnya sistem-sistem

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal, 50



keamanan regional yang sangat kuat atau aliansi-aliansi di luar PBB, seperti NATO atau Organisasi Pakta Warsawa, suatu gejala berkembangnya keretakan persatuan di antara para anggota tetap dan kurangnya kepercayaan terhadap kegunaan sistem keamanan kolektif yang besar didasarkan pada Dewan Keamanan. Yang ketiga adalah berkembangnya operasi-operasi “pemulihan perdamaian” baik berdasarkan Bab VI dan Bab VII Piagam PBB, penggunaan kekuatan militer terbatas, sumbangan sukarela oleh negara-negara anggota, peninjauan dan pencarian fakta (sebagai contoh UNTSO, UNMOGIP (Kashmir), UNYOM (Yaman), UNIFIL (Libanon), UNDOF (Dataran Tinggi Golan) atau memelihara hukum dan ketertiban dalam situasi yang menyangkut suatu ancaman perdamaian yang aktual dan baru terjadi.<sup>52</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Negara Libya**

### **1. Sejarah Negara Libya**

Ketika merujuk pada peta dunia, maka akan ditemukan negara Libya terletak di kawasan utara benua Afrika, sebelah timur berbatasan dengan laut tengah Mesir, sebelah tenggara berbatasan dengan Sudan, sebelah selatan berbatasan dengan Chad dan Niger, dan sebelah barat berbatasan dengan Aljazair dan Tunisia. Libya beribukotakan Tripoli yang terdiri dari beberapa

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hal, 50-51



pusat kota, yaitu Tripolitania, Fezzah dan Curenica. Libya juga akrab dengan sebutan negeri hijau, yang memang negara ini dikelilingi gurun tandus dan gurun tandus. Namun di Libya tumbuhan hijau bersemai sehingga dari sinilah muncul istilah tersebut. Libya menduduki posisi yang strategis dari kondisi geografis. Nama Libya berasal dari bahasa Mesir "*Lebu*" yang merupakan sebutan dari orang Barbar yang tinggal disebelah barat sungai Nil, yang kemudian diadopsi oleh bahasa Yunani sebagai "Libya".<sup>53</sup>

Pada zaman yahudi kuno istilah ini memiliki arti yang sangat luas, mencakup seluruh Afrika Utara di sebelah barat Mesir dan kadang ditujukan untuk seluruh benua Afrika. Menurut fakta sejarah, sebelum Libya menjadi negara indenpenden, Libya merupakan salah satu wilayah kekuasaan khalifah Islamiyah sejak invansi dakwah Islam ke kawasan Afrika Utara yang kemudian dikenal dengan Arab Barat. Kondisi ini berlangsung sampai masa pemerintahan Turki Utsmani berkuasa (abad 16-20 SM). Secara garis besar, penduduk yang menetap di Libya terdiri dari tiga etnis, yaitu etnis barbar (keturunan kaum tawariq) atau bangsa Arab yang datang sejak abad ke 7 SM, etnis Turki dan Alabania, dan etnis Italy yang datang pada masa penjajahan Italy atas Libya pada tahun 1911. Pada pemerintahan Turki Utsmani, Libya tumbuh dengan pesat, apalagi ditambah dengan hadirnya suatu gerakan oposisi yang bersifat *sufistik* dan perjuangan politik, dimana gerakan tersebut adalah Tarekat Sufi

---

<sup>53</sup> <http://Wikipedia.com;sejarah-negara-Libya;co.id.te>, diakses pada hari Selasa tanggal 19 Juli pukul 20.00 WIB



Sanusiah. Kelompok ini menjadi suatu gerakan oposisi yang sangat kuat dan memang termasuk juga gerakan-gerakan sosial dan keagamaan.<sup>54</sup>

Tahun 1911 Libya mulai digerogeti serta dijajah oleh penguasa Italy, dengan masuknya pasukan Italy di pinggiran kota Libya. Pasukan tersebut melontarkan tekanan-tekanan militer terhadap masyarakat Libya yang bertujuan merebut kekuasaan Libya dari tangan Turki Utsmani. Dalam perjalanannya, penjajahan yang diluncurkan oleh penguasa Italy tersebut tidaklah semulus dengan apa yang mereka harapkan. Banyak perlawanan sengit dari rakyat Libya. Terutama mereka yang tergabung dalam gerakan Sanisiah. Perlawanan tersebut berupa penekanan terhadap pasukan penjajah dengan aksi perang gerilya. Akhirnya Libya memperoleh kemerdekaan yang diiringi dengan dengan berakhirnya perang dunia ke II. Kemerdekaan Libya dengan di deklarasikannya Negara Monarki Libya pada tanggal 24 September 1951 dengan lagu kebangsaan Allahu Akbar oleh Raja Idris I. Beliau merupakan cucu dari pendiri gerakan As-Sanusiah. Atas bantuan Inggris dan Uni Soviet serta pengakuan dari PBB, Libya pun mengangkat bendera hijau sebagai lambang kemerdekaannya. Bermula dari kepemimpinan raja Idris inilah Libya mulai mengembangkan sayapnya dengan Negara-negara tetangga baik barat maupun dunia Islam secara menyeluruh. Ditambah lagi pada saat ditemukannya sumber minyak Libya sekitar tahun 1953, dan dimualinya eksploitasi pada

---

<sup>54</sup> <http://www.osunpos.co.id/?mib=berita.detail&id=14410>, diakses pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 pukul 20.00 WIB

tahun 1956, dan Libya mulai melakukan aksi penjualan minyak ke Eropa sejak tahun 1967.

## **2. Sistem Pemerintahan Libya**

Dilihat dari aspek politik, Libya sejak merdeka telah mengalami tiga perubahan bentuk pemerintahan, pertama bentuk Monarki ( Kerajaan ), kedua Republika, ketiga Sosial Republik. Dan dalam rentang sejarahnya selama 58 tahun sejak merdeka hingga sekarang pun politik Libya banyak mengalami pasang surut, hubungan yang awalnya sangat baik dengan Barat (Inggris dan Amerika) dimasa Raja Idris, setelah revolusi ternyata Muammar Qaddafi bersama 12 anggota dewan revolusinya menginginkan kiblat politiknya ke Soviet. Secara langsung konsekuensi besar yang harus dihadapi oleh para Revolusioner adalah harus kontrak serta memusuhi Inggris dan Amerika, dengan bukti segala kepentingan dua Negara tersebut di depak dari Libya, serta ditambah lagi dengan aksi-aksi terorisme dan penindasan terhadap kaum oposan yang dilakukan Libya menurut kaca mata serta tuduhan Amerika dan Inggris, keadaan itu semakin memperuncing hubungan Libya dengan kedua Negara tersebut.

Perubahan pemerintahan berubah ketika Raja Idris sedang ke Yunani untuk berobat. Muncul kabar, karena sering sakit-sakitan, Raja Idris akan lengser. Dia menyerahkan kekuasaan kepada keponakannya, yang menjadi



putra mahkota, Sayyid Hasan ar-Rida al-Mahdi as-Sanusi, atau Hasan as-Sanusi. Tanggal penyerahan tahta dari Raja Idris kepada Pangeran Hassan berlangsung pada 2 September 1969. Sehari sebelum ritual penyerahan tahta, saat Idris masih di luar negeri, Qadafi bergerak. Dia mengumumkan di radio, Libya berada di tangan Dewan Revolusi yang akan menyelamatkan negara dari kekosongan kekuasaan. Junta militer pimpinan Qadafi lalu menangkap kepala staf militer dan kepala keamanan, yang setia dengan Raja Idris. Sang Raja terhenyak. Dia tak bisa lagi pulang, hingga wafat di Mesir pada 1983. Stasiun berita BBC menceritakan bagaimana Qadafi, perwira 27 tahun namun telah berpangkat kolonel, secara cemerlang melakukan kudeta tak berdarah. “Kudeta itu hanya memuntahkan beberapa peluru,” tulis BBC.<sup>55</sup>

Nasib calon raja yang batal, Hasan as-Sanusi lebih buruk. Dia menjadi tahanan rumah, dan sempat dipenjara selama tiga tahun pada 1971. Hasan dan keluarga diusir dari rumah mereka pada 1984. Setelah menyingkirkan kekuatan lama, pada awal berkuasa, rezim Qadafi melakukan perubahan besar. Kerajaan Libya dibubarkan. Dia lalu membentuk Republik Sosialis Arab, dengan nama resmi Republik Rakyat Sosialis Agung Jamahiriya Arab Libya. Bendera nasional pun diganti, dari gabungan warna merah, hitam, dan hijau, dengan lambang bintang dan bulan sabit di tengah-tengah, menjadi warna hijau polos. Qadafi pun tak menyatakan diri sebagai presiden atau raja. Dia menabalkan

---

<sup>55</sup> <http://www.anneahira.com/konflik-libya.htm>, diakses pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 pukul 20.30. WIB



dirinya seorang “*brother leader*”, dan sang pemandu revolusi. Dia sempat menjabat perdana menteri selama 1970-1972. Sebagai pemimpin belia, Qadafi menunjukkan kepada bangsa Arab, perubahan radikal sedang bergerak di Libya. Sistem pemerintahan Libya dirombak. Menurut kajian Library of Congress pada 1987 berjudul “Government and Politics of Libya”, Libya dipimpin dua pilar utama, yang disebut dengan sektor. Salah satu pilar, yaitu “Sektor Revolusioner,” terdiri dari Qadafi sebagai pemimpin Revolusi, Komite Revolusi, dan Dewan Komando Revolusi, yang beranggotakan 12 orang. Mereka inilah inti kekuasaan di Libya karena para komite dan dewan tidak dipilih, melainkan ditunjuk, serta tak ada masa bakti. Pilar lain adalah “Sektor Jamahiriyah”, adalah Kongres Rakyat mewakili 1.500 wilayah, dan 32 anggota Kongres Rakyat Sha’biyat. Mereka dilihat sebagai lembaga legislatif. Para anggotanya dipilih setiap empat tahun. Sejak 1972, rezim Qadafi melarang partai politik. Media massa nasional pun dibelenggu agar tidak “menyesatkan” rakyat dengan pemberitaan kritis kepada pemerintah.

Seperti Mao Zedong di China pada 1960an, Qadafi pada 1975 menerbitkan buku panduan ideologi bagi pejabat dan rakyat Libya. Dia menyebutkan sebagai “Kitab Hijau” (Green Book). Terbit dalam bahasa Arab, Kitab Hijau menjabarkan tiga paham dasar, yaitu “Demokrasi berdasarkan Kekuasaan Rakyat,” “Ekonomi Sosialisme” dan “Teori Internasional Ketiga.” Paham itu lalu menjadi panduan bagi sistem demokrasi ala Qadafi, sekaligus



panduan politik luar negeri Libya yang mengundang kontroversi. “Kitab Hijau” menolak demokrasi liberal ala Barat, dan mendorong sistem demokrasi langsung berdasarkan pembentukan komite-komite rakyat. Belakangan, sistem ini dikritik sebagai cara Qadafi mengamankan kepentingannya di balik jargon memberdayakan rakyat Libya.

### **3. Bentuk-Bentuk Kerjasama Negara Libya Dengan Negara Lain**

Kerjasama Libya dengan negara lain kebanyakan berbentuk kerjasama Bilateral di bidang ekonomi. Seperti dengan negara Swiss. Libya memasok minyak mentah untuk Swiss. Di samping itu, Libya juga memiliki aset-aset berbentuk saham yang ditanam di Swiss. Negara Indonesia juga memiliki hubungan kerjasama dengan Libya, misalnya dalam bidang perdagangan, pariwisata, budaya dan investasi. Dalam hal perdagangan, Indonesia mengeksport beberapa produk untuk negara Libya, seperti tekstil, kayu, peralatan elektronik dan lain-lain. Untuk negara amerika, libya mengadakan hubungan dalam bidang energi. Sementara itu, penguasaan Libya atas beberapa ladang minyak besar di Afrika dan beberapa kawasan lain seperti Maroko, Algeria dan Tunisia menjadikan posisi Libya sangat penting bagi Amerika Serikat dan Eropa.

Sementara itu, penguasaan Libya atas beberapa ladang minyak besar di Afrika dan beberapa kawasan lain seperti Maroko, Algeria dan Tunisia menjadikan posisi Libya sangat penting bagi Amerika Serikat dan Eropa.





### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. ASPEK HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 1970 TAHUN 2011 TENTANG LIBYA.**

Pergolakan politik di Libya yang terjadi di awal tahun 2011 ini menyebabkan 1000 orang demonstran tewas. Moamar Qadafi sebagai presiden Libya telah melakukan pelanggaran HAM terhadap para demonstran untuk menekan pergolakan.<sup>29</sup> Tidak hanya pelanggaran HAM terhadap demonstran, Moamar Qadafi juga mengintimidasi media agar peristiwa di Libya tidak diketahui oleh dunia Internasional. Selama 42 tahun berkuasa, Qadhafi dikenal sebagai seorang pemimpin yang tidak asing dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia berat atas rakyatnya sendiri. Bahkan tidak berlebihan kalau ia dinilai sebagai diktator di kawasan Afrika Utara/Timur Tengah yang paling kejam. Pada tahun 1996 misalnya, rezim Qadhafi menembak mati sekitar 1.200 orang di penjara Abu Salim di Tripoli. Sejarah kekerasan Qadhafi tersebut, ditambah dengan perilaku dan cara dia menyikapi gejolak politik terakhir, meningkatkan ketidakpastian akan apa yang dapat terjadi kemudian di Libya.

---

<sup>29</sup><http://www.surabayapost.co.id>, diakses pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 pukul 21.00

Apa pun bisa ia lakukan, termasuk pembantaian besar-besaran atas pemberontak dan warga sipil.<sup>30</sup>

Rangkaian fakta dan peristiwa itulah yang kemudian mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 1970 pada akhir Februari 2011 untuk mengambil langkah-langkah mengatasi konflik Libya tersebut. Kewenangan Dewan Keamanan PBB tidak lepas dari Piagam PBB karena di dalam piagam PBB diatur mengenai tindak tanduk dewan ini. Salah satu fungsi yang mencolok dari Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian dan keamanan Internasional, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 24 Piagam PBB, yaitu:

- 1) Dalam rangka untuk memastikan tindakan cepat dan efektif oleh PBB, anggotanya memberikan tanggung jawab utama pada Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan setuju bahwa dalam melaksanakan tugasnya di bawah tanggung jawab ini, Dewan Keamanan bertindak atas nama mereka.
- 2) Dalam pemakaian tugas-tugas Dewan Keamanan harus bertindak sesuai dengan Tujuan dan Prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan Keamanan untuk melepaskan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Bab VI, VII, VIII, dan XII.
- 3) Dewan Keamanan harus menyampaikan tahunan dan, bila perlu, laporan khusus kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan.

Dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan Internasional, Dewan Keamanan PBB diberi kewenangan-kewenangan agar tercapainya tujuan dari

---

<sup>30</sup> <http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/03/31/intervensi-yang-dipertanyakan-banyak-orang/>, diakses pada hari Minggu tanggal 24 Juli 21.00 WIB



PBB tersebut misalnya jika terjadi persengketaan diantara dua Negara yang akan membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional, Dewan Keamanan PBB wajib melakukan langkah-langkah penyelesaian seperti yang diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB yaitu:

- 1) Para pihak yang bersengketa dalam hal apapun, kelanjutan yang kemungkinan akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari solusi melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum, resor untuk badan-badan regional atau pengaturan atau cara-cara damai lain menurut pilihan mereka sendiri.
- 2) Jika dianggap perlu Dewan Keamanan harus memanggil para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara seperti itu.

Pasal 33 tersebut diatas menjelaskan cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang membahayakan keamanan dan perdamaian Internasional, yaitu negosiasi antar Negara sengketa, penyelidikan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menemukan pelanggaran yang membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional, mediasi menggunakan pihak ketiga, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian hukum. Jika cara yang demikian tidak bisa menyelesaikan persengketaan Internasional, maka Dewan Keamanan PBB berwenang untuk memanggil para pihak sengketa untuk diselesaikan dengan cara yang disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (1) diatas. Pada pasal 33 piagam ini, Dewan Keamanan PBB hanya berwenang untuk menengahi para pihak sengketa dengan tujuan mencari jalan keluar agar tercapainya kesepakatan damai antara

para pihak. Pasal 33 tidak mengharuskan Dewan Keamanan PBB mengintervensi para pihak.

Dalam hal cara-cara yang terdapat dalam pasal 33 tidak berhasil, maka Dewan Keamanan PBB dapat mempergunakan kewenangan lain seperti yang dijelaskan dalam Pasal 34 Piagam PBB, yaitu:

“Dewan Keamanan dapat menyelidiki suatu sengketa, atau situasi yang mungkin menyebabkan gesekan internasional atau menimbulkan perselisihan, untuk menentukan apakah kelanjutan sengketa atau situasi yang mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional”.

Langkah yang disebutkan dalam Pasal 34 merupakan langkah lanjutan dari Pas 33, jika tidak terdapat penyelesaian melalui cara atau solusi yang disebut dalam Pasal 33 Piagam PBB. Pasal 34 memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan untuk melakukan penyelidikan terhadap persengketaan antara Negara, apakah di dalam persengketaan tersebut terdapat hal-hal yang mungkin membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional. Indikasi itu merupakan dasar bagi dewan untuk menyelesaikan sengketa melalui cara atau solusi lebih lanjut yang diatur dalam Piagam PBB, seperti mengeluarkan Resolusi.

Pada konflik di Negara Libya yang terjadi di awal tahun 2011, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi Nomor 1970 Tahun 2011 Tentang Libya. Rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011



diajukan oleh Jerman, Perancis dan Inggris.<sup>31</sup> Resolusi ini menuntut segera menghentikan kejahatan pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistemik terhadap warga Libya oleh rezim Khadafi. Hak asasi manusia harus ditegakkan, dan mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan harus diusut. Resolusi ini juga memuat langkah-langkah konkrit, antara lain larangan berkunjung, pembekuan harta di luar negeri, embargo senjata dan keterlibatan segera Mahkamah Pidana Internasional. Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1970 Tahun 2011 tidak memberi mandat pada anggota PBB untuk melakukan intervensi militer.

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1970 Tahun 2011 berdasarkan wewenang yang dimilikinya dalam Pasal 41 Piagam PBB yang menegaskan:

*"The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations. (Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata dan untuk memberi efek keputusan Dewan dapat meminta anggota PBB untuk menerapkan langkah-langkah tersebut. Ini termasuk gangguan lengkap atau hubungan parsial ekonomi dan rel, laut, udara, pos, telegram, radio, dan sarana komunikasi lainnya, dan pemutusan hubungan diplomatik)".*

---

<sup>31</sup> <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/388304/34/>, diakses pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 pukul 21.00 WIB

Isi keputusan Dewan Keamanan yang dimaksudkan dalam Pasal 41 Piagam PBB harus berupa tindakan yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata atau bukan intervensi militer, seperti pemutusan hubungan ekonomi antara suatu Negara sengketa dengan Negara-negara lainnya dan pemutusan hubungan diplomatik. Pasal 41 Piagam PBB tidak membenarkan penggunaan kekuatan militer atau intervensi militer terhadap suatu Negara sengketa tetapi membenarkan tindakan lain yang tidak berhubungan dengan penggunaan kekuatan militer terhadap Negara sengketa karena langkah-langkah yang disebutkan dalam Pasal 41 merupakan langkah awal dalam mengatasi sengketa yang akan mengancam perdamaian dan keamanan Internasional. Langkah-langkah penyelesaian sengketa dalam Pasal 41 tersebut dituangkan dalam isi keputusan dewan atau resolusi. Pada kasus Libya, isi dari resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011 yang berlandaskan dari Pasal 41 Piagam PBB adalah:

- I. Tuntutan Dewan Keamanan PBB kepada Presiden Libya untuk segera menghentikan pelanggaran HAM terhadap rakyat Libya.

Ada pun bunyi pasal dari resolusi tersebut adalah:

- 1) Tuntutan segera mengakhiri kekerasan dan panggilan untuk langkah-langkah untuk memenuhi tuntutan yang sah dari penduduk;
- 2) Mendesak pihak berwenang Libya untuk:
  - a. Dengan menahan diri, menghormati hak asasi manusia dan internasional hukum kemanusiaan, dan memungkinkan akses monitor langsung untuk hak asasi manusia internasional;



- b. Memastikan keselamatan semua warga negara asing dan aset mereka dan memfasilitasi keberangkatan mereka yang ingin meninggalkan negara;
  - c. Memastikan perjalanan yang aman bantuan kemanusiaan dan medis, dan lembaga kemanusiaan dan pekerja, ke negara;
  - d. Segera mengangkat pembatasan pada semua bentuk media;
- 3) Permintaan semua Negara Anggota, sejauh mungkin, untuk bekerja sama dalam evakuasi dari mereka warga negara asing yang ingin meninggalkan negara itu;

Isi Resolusi tersebut diatas menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menekankan pada penghentian pelanggaran HAM oleh Moamar Qadafi. Pelanggaran yang dimaksud adalah dalam artian pelanggaran HAM dan tindakan semena-mena oleh presiden Libya, dimana Moamar Qadafi telah membunuh demonstran untuk menekan pergolakan yang terjadi. Selain itu, juga mendesak pihak Libya untuk menghormati hak asasi manusia dan memastikan keselamatan warga asing beserta aset-aset mereka dari pergolakan tersebut. Pihak berwenang Libya harus memfasilitasi warga asing yang ingin meninggalkan negara Libya tersebut. Tuntutan ini dilakukan bukan dengan menggunakan kekuatan atau intervensi militer dari negara anggota PBB tetapi dengan menekankan kepada presidet Libya agar menghentikan pelaggaran terhadapHAM.

## II. Rujukan ke *Internasional Criminal Court* (Pengadilan Pidana Internasional)

Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

- 1) Memutuskan untuk merujuk situasi di Jamahiriya Arab Libya sejak 15 Februari 2011 kepada Jaksa Pengadilan Pidana Internasional;

- 2) Memutuskan bahwa pihak berwenang Libya akan bekerja sama penuh dengan dan menyediakan setiap bantuan yang diperlukan untuk Pengadilan dan Jaksa berdasarkan resolusi ini, dan sementara mengakui bahwa Negara bukan pihak Statuta Roma memiliki kewajiban bawah Statuta, mendesak semua negara dan prihatin internasional regional dan lainnya organisasi untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Pengadilan dan Jaksa;
- 3) Memutuskan bahwa warga negara, saat ini atau mantan pejabat atau personil dari Negara Arab Jamahiriya luar Libya yang tidak menjadi pihak pada Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif itu Negara untuk semua tindakan yang dituduhkan atau kelalaian yang timbul dari atau terkait dengan operasi dalam Jamahiriya Arab Libya dibentuk atau disahkan oleh Dewan, kecuali seperti yurisdiksi eksklusif telah tegas diabaikan oleh Negara;
- 4) Mengundang Jaksa ke alamat Dewan Keamanan dalam waktu dua bulan dari penerapan resolusi ini dan setiap enam bulan setelahnya pada tindakan yang diambil sesuai dengan resolusi ini;
- 5) Mengakui bahwa tidak ada biaya yang terjadi sehubungan dengan rujukan, termasuk biaya yang terkait dengan investigasi atau penuntutan sehubungan dengan rujukan itu, akan ditanggung oleh PBB dan bahwa biaya tersebut akan ditanggung oleh para pihak pada Statuta Roma dan negara-negara yang ingin berkontribusi sukarela;

Pada bagian bab II ini Dewan Keamanan memutuskan merujuk situasi di Libya ke Pengadilan Pidana Internasional karena terdaptnya pelanggaran-pelanggaran HAM selama pergolakan Libya dan untuk permasalahan HAM memang harus diselesaikan di Pengadilan Pidana Internasional. Rujukan agar sengketa tersebut dibawa ke Pengadilan Pidana Internasional merupakan kewenangan Dewan Keamanan PBB seperti yang dimaksud dalam pasal 41 Piagam PBB karena tindakan ini bukan merupakan tindakan yang menggunakan kekuatan bersenjata.

### III. Embargo Senjata



Bunyi pasal yang menyangkut ini adalah:

- 1) Memutuskan bahwa semua Negara Anggota harus segera mengambil langkah-langkah untuk mencegah suplai langsung atau tidak langsung, penjualan atau transfer ke Libya, dari atau melalui wilayah mereka atau oleh warga negara mereka, atau menggunakan bendera mereka kapal atau pesawat udara, senjata dan perlengkapan terkait dari semua jenis, termasuk senjata dan amunisi, kendaraan dan peralatan militer, peralatan paramiliter, dan suku cadang suku cadang untuk pelatihan, bantuan tersebut, dan teknis, keuangan atau lainnya bantuan, yang berhubungan dengan kegiatan militer atau penyediaan, pemeliharaan atau penggunaan apapun senjata dan perlengkapan terkait, termasuk penyediaan personel tentara bayaran bersenjata apakah atau tidak berasal dari wilayah mereka, dan memutuskan lebih lanjut bahwa tindakan ini tidak berlaku untuk:
  - a. Kebutuhan non-aktifkan peralatan militer semata-mata ditujukan untuk kemanusiaan atau menggunakan pelindung, dan bantuan teknis terkait atau pelatihan, sebagai disetujui terlebih dahulu oleh Komite yang dibentuk sesuai dengan ayat 24 di bawah ini;
  - b. Pelindung pakaian, termasuk jaket antipeluru dan helm militer, sementara diekspor ke Jamahiriya Arab Libya oleh personil PBB, perwakilan media dan pekerja kemanusiaan dan pembangunan dan terkait personel, untuk penggunaan pribadi mereka saja, atau
  - c. Lainnya penjualan atau pasokan senjata dan bahan-bahan terkait, atau penyediaan bantuan atau personel, yang disetujui terlebih dahulu oleh Komite;
- 2) Memutuskan bahwa Jamahiriya Arab Libya akan menghentikan ekspor semua senjata dan perlengkapan terkait dan bahwa semua Negara Anggota harus melarang pengadaan barang tersebut dari Jamahiriya Arab Libya oleh warga negara mereka, atau menggunakan mereka kapal berbendera atau pesawat udara, dan apakah atau tidak berasal dari wilayah Jamahiriya Arab Libya;
- 3) Panggilan kepada semua Negara, khususnya di Negara-negara tetangga Arab Libya Jamahiriya, untuk memeriksa, sesuai dengan otoritas nasional dan undang-undang dan konsisten dengan hukum internasional, khususnya hukum laut dan relevan internasional penerbangan sipil perjanjian, semua kargo dari dan ke Arab Libya Jamahiriya, di wilayah mereka, termasuk pelabuhan dan bandara, jika negara yang bersangkutan memiliki informasi yang memberikan alasan untuk percaya kargo berisi item pasokan,



penjualan, pemindahan, atau ekspor yang dilarang oleh paragraf 9 atau 10 ini resolusi untuk tujuan menjamin pelaksanaan yang ketat dari ketentuan-ketentuan;

- 4) Memutuskan untuk mengotorisasi semua Negara Anggota untuk, dan bahwa semua Negara Anggota wajib, atas penemuan barang-barang yang dilarang oleh ayat 9 atau 10 resolusi ini, merebut dan membuang (seperti melalui penghancuran, rendering bisa dioperasi, penyimpanan atau mentransfer ke Negara lain selain Amerika yang berasal atau tujuan untuk pembuangan) item pasokan, penjualan, transfer atau ekspor yang dilarang oleh paragraf 9 atau 10 resolusi ini dan memutuskan lebih lanjut bahwa semua Negara Anggota harus bekerjasama dalam upaya-upaya tersebut;
- 5) Membutuhkan setiap Negara Anggota ketika melakukan pemeriksaan sesuai dengan paragraf 11 di atas, untuk menyerahkan laporan yang ditulis segera awal untuk Komite mengandung, khususnya, penjelasan alasan untuk inspeksi, hasil inspeksi tersebut, dan apakah atau tidak sama diberikan, dan, jika dilarang item untuk transfer ditemukan, lebih lanjut membutuhkan Negara Anggota tersebut untuk menyerahkan kepada Komite, pada tahap kemudian, sebuah laporan tertulis yang berisi rincian yang relevan berikutnya pada inspeksi, kejang, dan pembuangan, dan rincian yang relevan dari transfer, termasuk deskripsi item, asal mereka dan tujuan, jika ini informasi tidak dalam laporan awal;
- 6) Mendorong Negara-negara Anggota untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah mereka sangat warga negara dari bepergian ke Jamahiriya Arab Libya untuk berpartisipasi dalam kegiatan atas nama pemerintah Libya yang cukup dapat berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia;

Dalam rangka mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan menghimbau kepada negara-negara anggota PBB untuk tidak menyuplai atau mengirim persenjataan ke Libya dan memutuskan hubungan di bidang persenjataan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penguatan kekuatan militer Moamar Qadafi yang semena-mena melakukan pembantaian terhadap demonstran Libya. Himbauan embargo senjata ditujukan untuk melindungi hak rakyat Libya.



#### IV. Larangan Perjalanan

Bunyi pasal yang menyangkut ini adalah:

- 1) Memutuskan bahwa semua Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah masuknya ke dalam atau transit melalui wilayah mereka individu yang tercantum dalam Lampiran I dari resolusi ini atau yang ditunjuk oleh Komite yang dibentuk sesuai dengan paragraf 24 di bawah ini, asalkan tidak ada dalam ayat ini mewajibkan Negara untuk menolak masuk warga sendiri ke wilayahnya;
- 2) Memutuskan bahwa tindakan yang dikenakan oleh ayat 15 di atas tidak akan berlaku:
  - a. Bilamana Komite menentukan berdasarkan kasus per kasus bahwa seperti perjalanan dibenarkan atas dasar kebutuhan kemanusiaan, termasuk kewajiban agama;
  - b. Bila masuk atau transit diperlukan untuk pemenuhan proses peradilan;
  - c. Bilamana Komite menentukan berdasarkan kasus per kasus bahwa pembebasan akan lebih lanjut tujuan perdamaian dan rekonsiliasi nasional di Jamahiriya Arab Libya dan stabilitas di kawasan, atau
  - d. Apabila suatu Negara menentukan berdasarkan kasus per kasus yang seperti entri atau transit yang diperlukan untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di Jamahiriya Arab Libya dan Amerika kemudian memberitahukan Komite dalam waktu empat puluh delapan jam setelah melakukan seperti penentuan;

Selain dikeluarkannya peraturan embargo senjata, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan peraturan terhadap Libya yaitu larangan perjalanan. Larangan perjalanan ini berupa tindakan yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, dimana Moamar Qadafi dilarang oleh Dewan Keamanan PBB meninggalkan Libya selama konflik belum selesai. Pasal 15 Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011 ini juga memerintahkan negara-negara

anggota PBB mencegah Moamar Qadafi dan kroninya untuk masuk ke negara naungan PBB. Larangan perjalanan ini diberlakukan terhadap nama-nama yang terdapat di dalam Lampiran I Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011, yaitu:<sup>32</sup>

1. Al-Baghdadi, Dr Abdulqader Muhammad  
Paspor nomor: B010574.  
Tanggal lahir: 1950/01/07.  
Kepala Kantor Penghubung Komite Revolusi. Komite Revolusioner yang terlibat dalam kekerasan terhadap demonstran.
2. Dibri, Abdulqader Yusuf  
Tanggal lahir: 1946. Tempat lahir: Houn, Libya.  
Kepala keamanan pribadi Muammar Qadhafi itu. Tanggung jawab untuk rezim keamanan. Sejarah mengarahkan kekerasan terhadap para pembangkang.
3. Dorda, Abu Zaid Umar  
Direktur Eksternal Organisasi Keamanan. Rezim loyalis.  
Kepala badan intelijen. eksternal
4. Jabir, Mayor Jenderal Abu Bakar Yunis  
Tanggal lahir: 1952.  
Tempat lahir: Jalo, Libya.  
Menteri Pertahanan. Keseluruhan tanggung jawab atas tindakan pasukan bersenjata.
5. Matuq, Matuq Muhammad  
Tanggal lahir: 1956.  
Tempat lahir: Khoms.  
Sekretaris Utilitas. Senior anggota rezim. Keterlibatan dengan Komite Revolusi. Masa lalu sejarah keterlibatan dalam penekanan perbedaan pendapat dan kekerasan.
6. Qadhaf Al-bendungan, Sayyid Muhammad  
Tanggal lahir: 1948.

---

<sup>32</sup> <http://www.S/RES/1970.com/annex I>



Tempat lahir: Sirte, Libya.

Sepupu Muammar Qadhafi. Pada 1980-an, Sayyid terlibat dalam

pembunuhan pembangkang kampanye dan diduga bertanggung jawab atas kematian beberapa di Eropa. Dia juga diduga telah terlibat dalam pengadaan senjata.

7. Qadhafi, Muammar Aisha

Tanggal lahir: 1978.

Tempat lahir: Tripoli, Libya.

Putri Muammar Qadhafi. Kedekatan asosiasi dengan rezim.

8. Qadhafi, Muammar Hannibal

Paspor nomor: B/002210.

Tanggal lahir: 20/09/1975.

Tempat lahir: Tripoli, Libya.

Anak Muammar Qadhafi. Kedekatan asosiasi dengan rezim.

9. Qadhafi, Muammar Khamis

Tanggal lahir: 1978.

Tempat lahir: Tripoli, Libya.

Anak Muammar Qadhafi. Kedekatan asosiasi dengan rezim.

Perintah

unit-unit militer yang terlibat dalam penindasan demonstrasi.

10. Qadhafi, Muammar Muhammad

Tanggal lahir: 1970.

Tempat lahir: Tripoli, Libya.

Anak Muammar Qadhafi. Kedekatan asosiasi dengan rezim.

11. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar

Tanggal lahir: 1942. Tempat lahir: Sirte, Libya.

Pemimpin Revolusi, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.

Tanggung jawab untuk memesan penindasan demonstrasi, pelanggaran hak asasi manusia.

12. Qadhafi, Mutassim

Tanggal lahir: 1976.

Tempat lahir: Tripoli, Libya.

Penasehat Keamanan Nasional. Anak Muammar Qadhafi.

Kedekatan asosiasi dengan rezim.

13. Qadhafi, Saadi

Paspor nomor: 014797.

Tanggal lahir: 25/05/1973.

Tempat lahir: Tripoli, Libya.

Komandan Pasukan Khusus. Anak Muammar Qadhafi.

Kedekatan asosiasi dengan rezim. Komando unit militer yang terlibat dalam penindasan demonstrasi.

14. Qadhafi, Saif al-Arab  
Tanggal lahir: 1982. Tempat lahir: Tripoli, Libya.  
Anak Muammar Qadhafi. Kedekatan asosiasi dengan rezim.
15. Qadhafi, Saif al-Islam  
Paspor nomor: B014995.  
Tanggal lahir: 25/06/1972.  
Tempat lahir: Tripoli, Libya.  
Direktur, Yayasan Qadhafi. Anak Muammar Qadhafi.  
Kedekatan asosiasi dengan rezim. Inflamasi laporan masyarakat mendorong kekerasan terhadap demonstran.
16. Al-Senussi, Kolonel Abdullah  
Tanggal lahir: 1949.  
Tempat lahir: Sudan.  
Direktur Intelijen Militer. Intelijen Keterlibatan militer dalam penindasan demonstrasi. Sejarah masa lalu termasuk dugaan keterlibatan dalam pembantaian penjara Abu Selim. Dihukum in absentia atas pemboman UTA penerbangan. Kakak ipar Muammar Qadhafi.

Pasal 16 Piagam PBB juga menambahkan, ketentuan larangan perjalanan ini tidak berlaku apabila perjalanan ke luar negeri dilakukan untuk dasar kebutuhan kemanusiaan, kewajiban agama, pemenuhan panggilan Pengadilan Pidana Internasional dan untuk kepentingan perdamaian Internasional. Tetapi jika tidak ada keadaan-keadaan yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ini, maka orang-orang yang ada namanya dalam Lampiran I resolusi tidak boleh meninggalkan negara Libya. Larangan perjalanan ke luar negeri terhadap Moamar Qadafi dan kroni-kroniya merupakan tindakan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.

#### V. Pembekuan Aset

Bunyi pasal yang menyangkut ini adalah:

- 1) Memutuskan bahwa semua Negara Anggota tanpa penundaan wajib membekukan semua dana, aset keuangan lainnya dan



sumber daya ekonomi yang berada di wilayah mereka, yang dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung, oleh individu atau kelompok yang tercantum dalam lampiran II resolusi ini atau yang ditunjuk oleh Komite yang dibentuk sesuai dengan ayat 24 di bawah, atau oleh individu atau kelompok yang bertindak atas nama mereka yang dimiliki atau dikendalikan oleh mereka, dan memutuskan lebih lanjut bahwa semua Negara Anggota harus menjamin bahwa setiap dana, aset keuangan atau sumber daya ekonomi dicegah dari yang disediakan oleh warga negara mereka atau oleh individu atau kelompok dalam wilayah mereka, atau untuk kepentingan individu atau identitas tercantum dalam Lampiran II ini resolusi atau individu yang ditunjuk oleh Komite;

- 2) Mengungkapkan niatnya untuk memastikan bahwa aset dibekukan berdasarkan Pasal 17 harus pada tahap selanjutnya dibuat untuk kepentingan orang-orang dari Jamahiriya Arab Libya;
- 3) Memutuskan bahwa tindakan yang dikenakan oleh ayat 17 di atas adalah berupa dana, aset keuangan lain atau sumber-sumber ekonomi yang telah ditentukan oleh Negara-negara Anggota yang relevan:
  - a) diperlukan untuk biaya dasar, termasuk pembayaran untuk bahan makanan, sewa atau hipotek, obat-obatan dan perawatan medis, pajak, premi asuransi, dan publik utilitas biaya atau khusus untuk pembayaran biaya profesional wajar dan penggantian biaya yang dikeluarkan terkait dengan penyediaan jasa hukum sesuai dengan hukum nasional, atau biaya atau biaya layanan, sesuai dengan hukum nasional, untuk rutin memegang atau pemeliharaan dana beku, keuangan aset dan sumber daya ekonomi, setelah pemberitahuan oleh Negara yang relevan dengan Komite niat untuk mengotorisasi, dimana tepat, akses ke dana tersebut, lainnya keuangan aset atau sumber daya ekonomi dan dalam ketiadaan negatif keputusan oleh Komite dalam waktu lima hari kerja pemberitahuan tersebut;
  - b) Untuk diperlukan untuk biaya yang luar biasa, asalkan bahwa seperti tekad telah diberitahu oleh Amerika Negara atau Anggota yang relevan dengan Komite dan telah disetujui oleh Komite; atau
  - c) Untuk menjadi subyek hak gadai, hukum administratif atau arbitrase atau pengadilan, dalam hal dana, aset keuangan lainnya dan sumber daya ekonomi dapat digunakan untuk memuaskan lien atau penilaian yang diberikan bahwa lien atau penilaian dimasukkan ke

sebelum tanggal resolusi ini, bukan untuk kepentingan orang atau badan ditunjuk sesuai dengan ayat 17 di atas, dan telah diberitahu oleh yang relevan Negara atau Negara Anggota kepada Komite;

- 4) Memutuskan bahwa Negara Anggota dapat mengizinkan penambahan ke rekening beku sesuai dengan ketentuan ayat 17 di atas kepentingan atau lainnya tempo pada rekening-rekening atau pembayaran jatuh tempo berdasarkan kontrak, perjanjian atau laba kewajiban yang timbul sebelum tanggal dimana account tersebut menjadi tunduk pada ketentuan-ketentuan resolusi ini, dengan ketentuan bahwa setiap kepentingan tersebut, pendapatan lain dan pembayaran terus tunduk pada ketentuan-ketentuan dan beku;
- 5) Memutuskan bahwa tindakan dalam ayat 17 di atas tidak akan mencegah orang yang ditunjuk atau badan dari melakukan pembayaran jatuh tempo berdasarkan kontrak memasuki sebelum daftar tersebut seseorang atau entitas, dengan ketentuan bahwa Amerika terkait telah menetapkan bahwa pembayaran tidak langsung atau tidak langsung diterima oleh seseorang atau entitas yang ditunjuk sesuai dengan ayat 17 di atas, dan setelah pemberitahuan oleh Amerika relevan dengan Komite niat untuk membuat atau menerima pembayaran tersebut atau untuk mengotorisasi, bila sesuai, unfreezing dana, aset keuangan lainnya atau sumber daya ekonomi untuk tujuan ini, 10 hari kerja sebelum otorisasi tersebut;

Pembekuan aset yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB adalah aset kekayaan Moamar Qadafi yang ada di negara-negara anggota PBB. Hal ini ditujukan untuk kepentingan warga Libya dan menghindari Muamar Qhadafi lari dari Libya. Aset yang dimaksud dalam resolusi ini adalah berupa dana, aset keuangan dan sumber daya ekonomi yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Moamar Qadafi dan kroni-kroninya di wilayah negara-negara anggota PBB.



## **B. PELAKSANAAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 1970 TAHUN 2011**

Pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011 bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat Libya atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Khadafi yang isinya secara tegas memerintahkan Khadafi untuk menghentikan kekejaman dan pelanggaran HAM terhadap rakyat Libya. Memperhatikan isi dari Resolusi Nomor 1970 Tahun 2011, maka tampak jelas bahwa negara-negara anggota PBB memiliki perhatian utama terhadap upaya perlindungan dan keselamatan masyarakat sipil di Libya. Sanksi yang dijatuhkan terhadap Libya ini semata-mata untuk menghentikan tindakan Khadafi yang membunuh rakyat Libya dalam pergolakan politik, karena langkah-langkah yang diambil oleh rezim Libya merupakan pelanggaran dengan jelas memotong semua norma yang mengatur perilaku internasional dan pelanggaran serius hak asasi manusia. Dengan adanya sanksi tersebut yang berisikan himbauan terhadap negara-negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan dengan Libya, diharapkan Khadafi segera menghentikan kejahatan HAM yang dilakukannya. Sejak pergolakan politik di Libya, telah banyak korban yang berjatuhan dan membuat negara-negara anggota PBB khawatir terhadap warga negaranya yang sedang berada di Libya pada waktu konflik terjadi. Negara anggota pun segera menarik warga negaranya yang berada di Libya untuk dibawa pulang sampai situasi konflik di Libya berakhir. Dikhawatirkan juga konflik meluas terhadap keamanan dan perdamaian Internasional.

Dewan Keamanan telah mendasarkan dari legitimasi dari Resolusi Nomor 1970 Tahun 2011 dari kepentingan untuk melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia setelah melihat sepak terjang rezim Khadafi yang terkesan membabi buta melakukan pembunuhan rakyat sipil selama pergolakan politik di Libya. Hal ini terutama sesuai dengan rujukan pada Pasal 39-40 Piagam PBB yang memberikan otoritas kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan ketika terjadi suatu kondisi yang dinilai berpotensi mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Disamping dasar legitimasi secara hukum tersebut, para pihak pendukung resolusi juga mendasarkan pada argumen moral pentingnya masyarakat internasional menjaga hak asasi manusia. Kecermatan dan ketepatan penggunaan argumen ini kiranya menjadi krusial mengingat dikeluarkannya Resolusi Nomor 1970 Tahun 2011 kembali menjadi indikator betapa semakin berkembangnya pengertian dari pasal-pasal dalam Bab VII Piagam PBB yang pada gilirannya akan menambah kompleksitas nuansa dari diskursus klasik antara prinsip kedaulatan negara dan kepentingan untuk melindungi hak asasi manusia.

Pelaksanaan dari resolusi ini dipatuhi oleh negara anggota PBB dengan tujuan agar Qadafi menghentikan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap rakyat Libya. Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1970 Tahun 2011 dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang bijak bagi krisis kemanusiaan di Libya karena krisis di Libya telah mempengaruhi perdamaian dan keamanan dunia Internasional. Namun dalam kenyataannya resolusi yang dikeluarkan oleh



Dewan Keamanan PBB nomor 1970 tahun 2011, Qadafi tetap melanggar isi dari Resolusi tersebut dan terus melakukan pembantaian terhadap warga sipil. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Qadafi itu menimbulkan kekhawatiran di dunia Internasional serta dinilai telah melanggar perdamaian dan keamanan dunia Internasional. Tetapi Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1970 Tahun 2011 ini juga dapat dianggap sebagai pintu bagi terlaksananya penggunaan kekuatan militer oleh PBB. Sesuai Pasal 42 Piagam PBB, dalam hal Qadafi mengabaikan Resolusi Nomor 1970 Tahun 2011 atau sanksi atas Libya dianggap tidak cukup, maka Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan kekuatan militer atas Libya.<sup>33</sup>

### **C. IMPLIKASI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 1970 TAHUN 2011 TERHADAP KEAMANAN DAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL**

Dikeluarkannya Resolusi Nomor 1970 Tahun 2011, sedikit banyaknya telah memberikan implikasi dan pengaruh terhadap dunia Internasional. Resolusi ini dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB demi menegakkan keamanan dan perdamaian internasional agar tidak adanya permasalahan internasional antara negara satu dengan negara lainnya khususnya kepada pemerintahan Libya Muammar Qhadafi yang telah melakukan banyak pelanggaran internasional yang

---

<sup>33</sup> <http://www.setkab.go.id/index.php/berita/2011/01/06/index.php?pg=detailartikel&p=1265>, diakses pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2011 pukul 20.25 WIB

mengakibatkan kerugian yg diderita negara lain. Dengan Resolusi ini, ada beberapa implikasi yang dapat mempengaruhi terhadap keamanan dan perdamaian internasional yaitu :

1. Negara-negara yang mempunyai hubungan kerjasama dan hubungan diplomasi dengan Libya telah menarik perwakilannya dari negara Libya tersebut karena isi dari Resolusi menghimbau kepada negara-negara agar mengecam tindakan Khadaffi untuk menghindari jatuhnya korban.
2. Memerintahkan negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara Libya. Contohnya Negara anggota PBB yang pertama kali memutuskan hubungan kerjasama dengan Libya adalah Perancis. Perancis memutuskan hubungan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan dan keuangan. Negara Italia juga memutuskan hubungan kerjasama di bidang perdagangan minyak.<sup>34</sup>
3. Memutuskan hubungan diplomatik dengan Negara Libya contohnya Pemerintah Peru memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Libya. Peru juga menyerukan kepada negara-negara lain di kawasan untuk melakukan sikap yang sama jika

---

<sup>34</sup><http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/02/23/78671/1.000-Tewas-dalam-Kerusuhan-Libya>, diakses pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011 pukul 23.50 WIB



pemerintahan Muammar Khadafi saat itu masih menyerang para demonstran.<sup>35</sup>

4. Memutuskan hubungan transportasi darat, laut dan udara

Bedasarkan uraian tentang implikasi Resolusi Nomor 1970 tahun 2011 tersebut diatas terhadap keamanan dan perdamaian internasional dapat dijelaskan bahwa hal ini dilakukan oleh negara-negara anggota PBB terhadap Libya dimaksudkan untuk memberikan efek sanksi dari resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011 dimana negara anggota PBB akan memutuskan kerjasama dalam berbagai bidang sampai Qadafi mematuhi isi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011.

---

<sup>35</sup> <http://us.dunia.vivanews.com/news/read/206082-peru-putus-hubungan-diplomatik-dengan-libya>, diakses pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011 pukul 23.55 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB nomor 1970 tahun 2011 adalah himbauan agar Moamar Qadafi menghentikan pelanggaran HAM terhadap rakyat Libya, rujukan Dewan Keamanan agar pelanggaran HAM yang dilakukan Moamar Qadafi dibawa ke Pengadilan Pidana Internasional, embargo senjata, larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap Moamar Qadafi beserta kroni-kroninya. Isi semua ketentuan dalam Resolusi tersebut merupakan keputusan Dewan Keamanan yang bukan merupakan tindakan berkekuatan senjata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 41 Piagam PBB.
2. Pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1970 tahun 2011 terhadap Moammar Qhadafi telah dijadikan pedoman oleh Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kekuatan bersenjata atas Libya ketika president Libya yaitu Moammar Qhadafi tidak mematuhi atau telah melanggar peraturan-peraturan dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1970 tahun 2011.
3. Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1970 tahun 2011 telah memberikan implikasi signifikan dalam mewujudkan keamanan dan perdamaian internasional khususnya dalam menghentikan kebijakan perbuatan Moammar Qhadafi yang melakukan berbagai pelanggaran internasional. Dampak



langsung yang mempengaruhi terhadap keamanan dan perdamaian internasional adalah negara-negara lain memutuskan hubungan kerja sama baik di bidang diplomasi, ekonomi, diplomat dan keputusan hubungan transportasi darat, laut dan udara.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya nasib tragis yang telah menimpa Alm. Moamar Qadafi yang tidak mematuhi isi dari Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1970 Tahun 2011 agar tidak lagi melakukan pembantaian terhadap demonstran dan dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemimpin-pemimpin otoriter lainnya diberbagai belahan dunia bahwa tidak ada kezaliman yang bertahan lama di dunia ini.
2. Dewan Keamanan PBB sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan Internasional harus benar-benar melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan tujuan Piagam PBB, untuk menghindari adanya kepentingan-kepentingan tersembunyi dari negara-negara lain terhadap negara Libya.
3. terlepas dari berbagai “dosa” yang dilakukan Qhadafi terhadap rakyatnya, kematiannya yang tragis harus dipertanggungjawabkan ke Mahkamah Pidana Internasional karena diduga telah terjadi pelanggaran terhadap hukum Humaniter Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bowet, D.W. 1992. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Bennet ,A. Roy. *International Organization* , edisi ke II (New Jersey: Prentice Hall, Inc.,1980)

B.Y.B.I.L 39 .1963. *Mengenai argumen yang menentang lihat Feinburg, “Unilateral Withdrawal from an International Organisation” Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice* (New York: Office of the Public Information)

Kantor Penerangan PBB

Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Alumni

Mauna, Boer. 2001. *Hukum Internasional*. Jakarta: Radja Grafindo Persada

Starke, J.G. 2008. *Pengantar Hukum Internasional (Edisi Kesepuluh)*. Jakarta: Sinar Grafika

Suryokusumo, Sumaryo. 1987. *Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press

Singh ,Nagendra. 1958. *Termination of Membership of International Organization*

UNCIO, Doc.1178. I/2/76/6(2), (Kelsen, *Law of the UN*. Bab 7)



## **B. Perundang-Undangan**

Piagam PBB

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 Tahun 2011 Tentang Libya

## **C. Website**

<http://Wikipedia.com;sejarah-negara-Libya;co,id,te>

<http://www.osunpos.co.id/?mib=berita.detail&id=14410>

<http://www.anneahira.com/konflik-libya.htm>

<http://www.surabayapost.co.id>

<http://www.setkab.go.id>

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/03/31/intervensi-yang-dipertanyakan-banyak-orang/>, diakses pada hari Minggu tanggal 24 Juli

<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/388304/34/>, diakses pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011

<http://bataviase.co.id/node/588895>, diakses pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011

<http://buletininfo.com/?menu=news&id=6396> diakses pada hari Minggu tanggal 30 Juli

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/02/23/78671/1.000-Tewas-dalam-Kerusuhan-Libya>, diakses pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011

<http://us.dunia.vivanews.com/news/read/206082-peru-putus-hubungan-diplomatik-dengan-libya>, diakses pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/06/15/lmsztp->

[liberia-putuskan-hubungan-dengan-pemerintah-qaddafi](#), diakses pada Hari

Minggu tanggal 24 Juli

<http://isias.wordpress.com/2011/04/05/intervensi-dunia-internasional->

[terhadap-libya-implikasi-dan-prospek](#), diakses pada hari Rabu tanggal 7

September 2011







## Security Council

Distr.: General  
26 February 2011

---

### Resolution 1970 (2011)

**Adopted by the Security Council at its 6491st meeting, on  
26 February 2011**

*The Security Council,*

*Expressing grave concern at the situation in the Libyan Arab Jamahiriya and condemning the violence and use of force against civilians,*

*Deploring the gross and systematic violation of human rights, including the repression of peaceful demonstrators, expressing deep concern at the deaths of civilians, and rejecting unequivocally the incitement to hostility and violence against the civilian population made from the highest level of the Libyan government,*

*Welcoming the condemnation by the Arab League, the African Union, and the Secretary General of the Organization of the Islamic Conference of the serious violations of human rights and international humanitarian law that are being committed in the Libyan Arab Jamahiriya,*

*Taking note of the letter to the President of the Security Council from the Permanent Representative of the Libyan Arab Jamahiriya dated 26 February 2011,*

*Welcoming the Human Rights Council resolution A/HRC/RES/S-15/1 of 25 February 2011, including the decision to urgently dispatch an independent international commission of inquiry to investigate all alleged violations of international human rights law in the Libyan Arab Jamahiriya, to establish the facts and circumstances of such violations and of the crimes perpetrated, and where possible identify those responsible,*

*Considering that the widespread and systematic attacks currently taking place in the Libyan Arab Jamahiriya against the civilian population may amount to crimes against humanity,*

*Expressing concern at the plight of refugees forced to flee the violence in the Libyan Arab Jamahiriya,*

*Expressing concern also at the reports of shortages of medical supplies to treat the wounded,*

---

\* Second reissue for technical reasons (10 March 2011).



*Recalling* the Libyan authorities' responsibility to protect its population,

*Underlining* the need to respect the freedoms of peaceful assembly and of expression, including freedom of the media,

*Stressing* the need to hold to account those responsible for attacks, including by forces under their control, on civilians,

*Recalling* article 16 of the Rome Statute under which no investigation or prosecution may be commenced or proceeded with by the International Criminal Court for a period of 12 months after a Security Council request to that effect,

*Expressing concern* for the safety of foreign nationals and their rights in the Libyan Arab Jamahiriya,

*Reaffirming* its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of the Libyan Arab Jamahiriya.

*Mindful* of its primary responsibility for the maintenance of international peace and security under the Charter of the United Nations,

*Acting* under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking measures under its Article 41,

1. *Demands* an immediate end to the violence and calls for steps to fulfil the legitimate demands of the population;

2. *Urges* the Libyan authorities to:

(a) Act with the utmost restraint, respect human rights and international humanitarian law, and allow immediate access for international human rights monitors;

(b) Ensure the safety of all foreign nationals and their assets and facilitate the departure of those wishing to leave the country;

(c) Ensure the safe passage of humanitarian and medical supplies, and humanitarian agencies and workers, into the country; and

(d) Immediately lift restrictions on all forms of media;

3. *Requests* all Member States, to the extent possible, to cooperate in the evacuation of those foreign nationals wishing to leave the country;

#### *ICC referral*

4. *Decides* to refer the situation in the Libyan Arab Jamahiriya since 15 February 2011 to the Prosecutor of the International Criminal Court;

5. *Decides* that the Libyan authorities shall cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and the Prosecutor pursuant to this resolution and, while recognizing that States not party to the Rome Statute have no obligation under the Statute, urges all States and concerned regional and other international organizations to cooperate fully with the Court and the Prosecutor;

6. *Decides* that nationals, current or former officials or personnel from a State outside the Libyan Arab Jamahiriya which is not a party to the Rome Statute of the International Criminal Court shall be subject to the exclusive jurisdiction of that State for all alleged acts or omissions arising out of or related to operations in the



Libyan Arab Jamahiriya established or authorized by the Council, unless such exclusive jurisdiction has been expressly waived by the State;

7. *Invites* the Prosecutor to address the Security Council within two months of the adoption of this resolution and every six months thereafter on actions taken pursuant to this resolution;

8. *Recognizes* that none of the expenses incurred in connection with the referral, including expenses related to investigations or prosecutions in connection with that referral, shall be borne by the United Nations and that such costs shall be borne by the parties to the Rome Statute and those States that wish to contribute voluntarily;

#### *Arms embargo*

9. *Decides* that all Member States shall immediately take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the Libyan Arab Jamahiriya, from or through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial or other assistance, related to military activities or the provision, maintenance or use of any arms and related materiel, including the provision of armed mercenary personnel whether or not originating in their territories, and decides further that this measure shall not apply to:

(a) Supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance or training, as approved in advance by the Committee established pursuant to paragraph 24 below;

(b) Protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to the Libyan Arab Jamahiriya by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel, for their personal use only; or

(c) Other sales or supply of arms and related materiel, or provision of assistance or personnel, as approved in advance by the Committee;

10. *Decides* that the Libyan Arab Jamahiriya shall cease the export of all arms and related materiel and that all Member States shall prohibit the procurement of such items from the Libyan Arab Jamahiriya by their nationals, or using their flagged vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the Libyan Arab Jamahiriya;

11. *Calls upon* all States, in particular States neighbouring the Libyan Arab Jamahiriya, to inspect, in accordance with their national authorities and legislation and consistent with international law, in particular the law of the sea and relevant international civil aviation agreements, all cargo to and from the Libyan Arab Jamahiriya, in their territory, including seaports and airports, if the State concerned has information that provides reasonable grounds to believe the cargo contains items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 9 or 10 of this resolution for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;

12. *Decides* to authorize all Member States to, and that all Member States shall, upon discovery of items prohibited by paragraph 9 or 10 of this resolution,



seize and dispose (such as through destruction, rendering inoperable, storage or transferring to a State other than the originating or destination States for disposal) items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by paragraphs 9 or 10 of this resolution and decides further that all Member States shall cooperate in such efforts;

13. *Requires* any Member State when it undertakes an inspection pursuant to paragraph 11 above, to submit promptly an initial written report to the Committee containing, in particular, explanation of the grounds for the inspections, the results of such inspections, and whether or not cooperation was provided, and, if prohibited items for transfer are found, further requires such Member States to submit to the Committee, at a later stage, a subsequent written report containing relevant details on the inspection, seizure, and disposal, and relevant details of the transfer, including a description of the items, their origin and intended destination, if this information is not in the initial report;

14. *Encourages* Member States to take steps to strongly discourage their nationals from travelling to the Libyan Arab Jamahiriya to participate in activities on behalf of the Libyan authorities that could reasonably contribute to the violation of human rights;

#### *Travel ban*

15. *Decides* that all Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of individuals listed in Annex I of this resolution or designated by the Committee established pursuant to paragraph 24 below, provided that nothing in this paragraph shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory;

16. *Decides* that the measures imposed by paragraph 15 above shall not apply:

(a) Where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation;

(b) Where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process;

(c) Where the Committee determines on a case-by-case basis that an exemption would further the objectives of peace and national reconciliation in the Libyan Arab Jamahiriya and stability in the region; or

(d) Where a State determines on a case-by-case basis that such entry or transit is required to advance peace and stability in the Libyan Arab Jamahiriya and the States subsequently notifies the Committee within forty-eight hours after making such a determination;

#### *Asset freeze*

17. *Decides* that all Member States shall freeze without delay all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the individuals or entities listed in annex II of this resolution or designated by the Committee established pursuant to paragraph 24 below, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, and decides further that all



Member States shall ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of the individuals or entities listed in Annex II of this resolution or individuals designated by the Committee;

18. *Expresses* its intention to ensure that assets frozen pursuant to paragraph 17 shall at a later stage be made available to and for the benefit of the people of the Libyan Arab Jamahiriya;

19. *Decides* that the measures imposed by paragraph 17 above do not apply to funds, other financial assets or economic resources that have been determined by relevant Member States:

(a) To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services in accordance with national laws, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant State to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such notification;

(b) To be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant State or Member States to the Committee and has been approved by the Committee; or

(c) To be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered into prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity designated pursuant to paragraph 17 above, and has been notified by the relevant State or Member States to the Committee;

20. *Decides* that Member States may permit the addition to the accounts frozen pursuant to the provisions of paragraph 17 above of interests or other earnings due on those accounts or payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of this resolution, provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to these provisions and are frozen;

21. *Decides* that the measures in paragraph 17 above shall not prevent a designated person or entity from making payment due under a contract entered into prior to the listing of such a person or entity, provided that the relevant States have determined that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity designated pursuant to paragraph 17 above, and after notification by the relevant States to the Committee of the intention to make or receive such payments or to authorize, where appropriate, the unfreezing of funds, other financial assets or economic resources for this purpose, 10 working days prior to such authorization;

*Designation criteria*

22. *Decides* that the measures contained in paragraphs 15 and 17 shall apply to the individuals and entities designated by the Committee, pursuant to paragraph 24 (b) and (c), respectively;

(a) Involved in or complicit in ordering, controlling, or otherwise directing, the commission of serious human rights abuses against persons in the Libyan Arab Jamahiriya, including by being involved in or complicit in planning, commanding, ordering or conducting attacks, in violation of international law, including aerial bombardments, on civilian populations and facilities; or

(b) Acting for or on behalf of or at the direction of individuals or entities identified in subparagraph (a).

23. *Strongly encourages* Member States to submit to the Committee names of individuals who meet the criteria set out in paragraph 22 above;

*New Sanctions Committee*

24. *Decides* to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council (herein "the Committee"), to undertake the following tasks:

(a) To monitor implementation of the measures imposed in paragraphs 9, 10, 15, and 17;

(b) To designate those individuals subject to the measures imposed by paragraphs 15 and to consider requests for exemptions in accordance with paragraph 16 above;

(c) To designate those individuals subject to the measures imposed by paragraph 17 above and to consider requests for exemptions in accordance with paragraphs 19 and 20 above;

(d) To establish such guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures imposed above;

(e) To report within thirty days to the Security Council on its work for the first report and thereafter to report as deemed necessary by the Committee;

(f) To encourage a dialogue between the Committee and interested Member States, in particular those in the region, including by inviting representatives of such States to meet with the Committee to discuss implementation of the measures;

(g) To seek from all States whatever information it may consider useful regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed above;

(h) To examine and take appropriate action on information regarding alleged violations or non-compliance with the measures contained in this resolution;

25. *Calls upon* all Member States to report to the Committee within 120 days of the adoption of this resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively paragraphs 9, 10, 15 and 17 above;



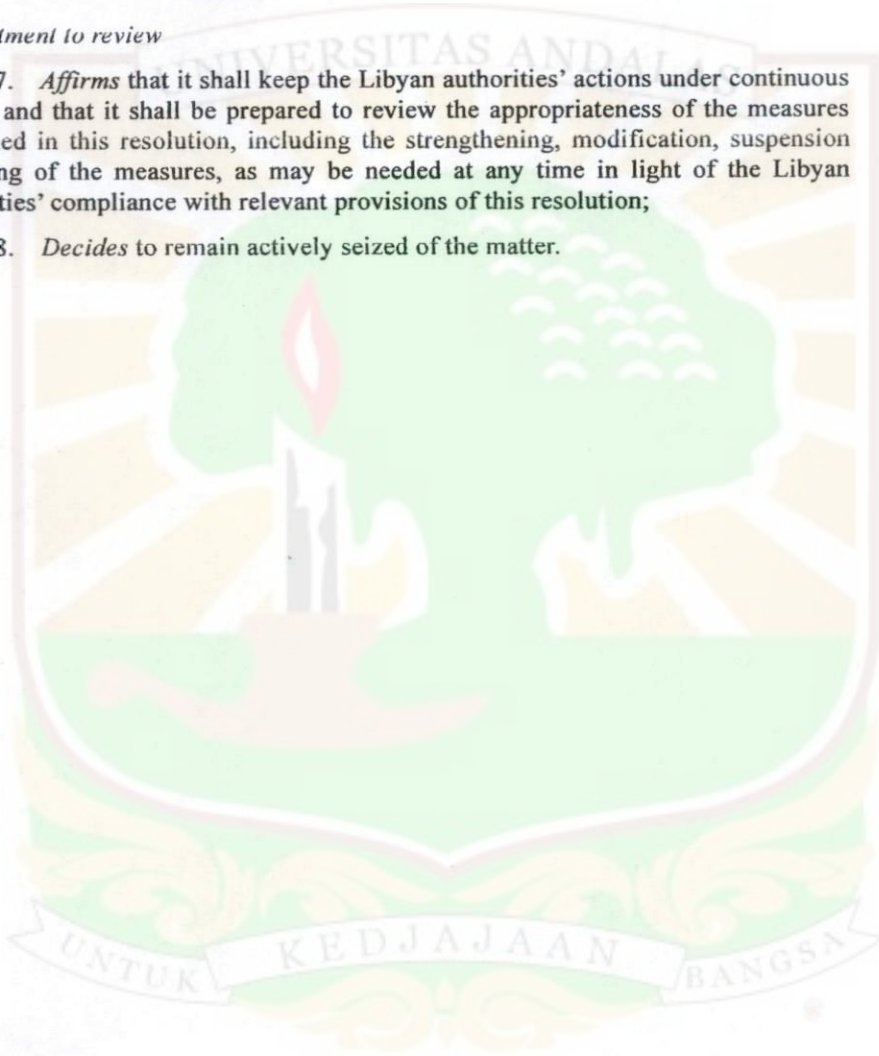
*Humanitarian assistance*

26. *Calls upon* all Member States, working together and acting in cooperation with the Secretary General, to facilitate and support the return of humanitarian agencies and make available humanitarian and related assistance in the Libyan Arab Jamahiriya, and requests the States concerned to keep the Security Council regularly informed on the progress of actions undertaken pursuant to this paragraph, and expresses its readiness to consider taking additional appropriate measures, as necessary, to achieve this;

*Commitment to review*

27. *Affirms* that it shall keep the Libyan authorities' actions under continuous review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in this resolution, including the strengthening, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at any time in light of the Libyan authorities' compliance with relevant provisions of this resolution;

28. *Decides* to remain actively seized of the matter.



## Annex I

### Travel ban

1. Al-Baghdadi, Dr Abdulqader Mohammed  
Passport number: B010574. Date of birth: 01/07/1950.  
Head of the Liaison Office of the Revolutionary Committees. Revolutionary Committees involved in violence against demonstrators.
2. Dibri, Abdulqader Yusef  
Date of birth: 1946. Place of birth: Houn, Libya.  
Head of Muammar Qadhafi's personal security. Responsibility for regime security. History of directing violence against dissidents.
3. Dorda, Abu Zayd Umar  
Director, External Security Organisation. Regime loyalist. Head of external intelligence agency.
4. Jabir, Major General Abu Bakr Yunis  
Date of birth: 1952. Place of birth: Jalo, Libya.  
Defence Minister. Overall responsibility for actions of armed forces.
5. Matuq, Matuq Mohammed  
Date of birth: 1956. Place of birth: Khoms.  
Secretary for Utilities. Senior member of regime. Involvement with Revolutionary Committees. Past history of involvement in suppression of dissent and violence.
6. Qadhaf Al-dam, Sayyid Mohammed  
Date of birth: 1948. Place of birth: Sirte, Libya.  
Cousin of Muammar Qadhafi. In the 1980s, Sayyid was involved in the dissident assassination campaign and allegedly responsible for several deaths in Europe. He is also thought to have been involved in arms procurement.
7. Qadhafi, Aisha Muammar  
Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.  
Daughter of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
8. Qadhafi, Hannibal Muammar  
Passport number: B/002210. Date of birth: 20/09/1975. Place of birth: Tripoli, Libya. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
9. Qadhafi, Khamis Muammar  
Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.  
Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.



10. Qadhafi, Mohammed Muammar  
Date of birth: 1970. Place of birth: Tripoli, Libya.  
Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
11. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar  
Date of birth: 1942. Place of birth: Sirte, Libya.  
Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed Forces.  
Responsibility for ordering repression of demonstrations, human rights abuses.
12. Qadhafi, Mutassim  
Date of birth: 1976. Place of birth: Tripoli, Libya.  
National Security Adviser. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
13. Qadhafi, Saadi  
Passport number: 014797. Date of birth: 25/05/1973. Place of birth: Tripoli, Libya.  
Commander Special Forces. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.
14. Qadhafi, Saif al-Arab  
Date of birth: 1982. Place of birth: Tripoli, Libya.  
Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
15. Qadhafi, Saif al-Islam  
Passport number: B014995. Date of birth: 25/06/1972. Place of birth: Tripoli, Libya.  
Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Inflammatory public statements encouraging violence against demonstrators.
16. Al-Senussi, Colonel Abdullah  
Date of birth: 1949. Place of birth: Sudan.  
Director Military Intelligence. Military Intelligence involvement in suppression of demonstrations. Past history includes suspicion of involvement in Abu Selim prison massacre. Convicted in absentia for bombing of UTA flight. Brother-in-law of Muammar Qadhafi.

## Annex II

### Asset freeze

1. Qadhafi, Aisha Muammar  
Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.  
Daughter of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
2. Qadhafi, Hannibal Muammar  
Passport number: B/002210. Date of birth: 20/09/1975. Place of birth: Tripoli, Libya. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
3. Qadhafi, Khamis Muammar  
Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.  
Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.
4. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar  
Date of birth: 1942. Place of birth: Sirte, Libya.  
Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed Forces.  
Responsibility for ordering repression of demonstrations, human rights abuses.
5. Qadhafi, Mutassim  
Date of birth: 1976. Place of birth: Tripoli, Libya.  
National Security Adviser. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
6. Qadhafi, Saif al-Islam  
Passport number: B014995. Date of birth: 25/06/1972. Place of birth: Tripoli, Libya.  
Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Inflammatory public statements encouraging violence against demonstrators.